

**LAPORAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
KABUPATEN SANGIHE TALAUD:
KONSEP DAN ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN**

**LAPORAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
KABUPATEN SANGIHE TALAUD:
KONSEP DAN ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN**

Widayatun
Bayu Setiawan
Aswatini Raharto



**PUSLITBANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 1999**

Wiayatu, Setiawan, Bayu, Raharto, Aswatini

Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sangihe
Talaud: Konsep dan Alternatif Strategi Pembangunan Sulawesi Utara.
Penulis. Wiayatu, Setiawan, Bayu, Aswatini, Jakarta: PPT-LIPI, 1999.
xiii, 55 hlm, 29 cm. (Seri Penelitian PPT-LIPI No.27/1999)

ISSN 0852-9280

1. Mobilitas 2. Perbatasan 3. Sulawesi Utara

I. Judul II. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

LAPORAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SANGIHE TALAUD:
Konsep dan Alternatif Strategi Pembangunan Sulawesi Utara
Penulis : Widayatun, Bayu Setiawan, Aswatini Raharto

Desain Sampul : Puji Hartana

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan oleh Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dicetak oleh CV. Bina Utama

KATA PENGANTAR

Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penikmat dari hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masa kini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup manusia sekarang ini dengan tidak mengganggu/membahayakan kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ketersediaan sumberdaya alam tidak tanpa batas, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) disamping upaya pemanfaatan dan pengembangan teknologi.

Dilihat dari potensi yang dimiliki, daerah perbatasan Indonesia di beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara, Irian Jaya dan Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Tetapi potensi sumberdaya manusianya masih kurang menguntungkan dilihat dari kualitas yang rendah, kuantitas serta persebarannya. Keadaan ini bertambah parah karena daerah perbatasan umumnya merupakan daerah yang rentan baik karena keterisolasiannya maupun kedekatannya dengan negara tetangga. Selain dari itu, daerah perbatasan di Indonesia umumnya merupakan daerah terpencil yang sulit dicapai sehingga masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.

Salah satu permasalahan sosial demografi yang dihadapi daerah perbatasan di Indonesia berkaitan dengan mobilitas penduduk, baik mobilitas internal maupun internasional. Permasalahan yang ditimbulkan bukan saja berkaitan dengan masalah persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan tetapi juga berkaitan dengan masalah pengembangan wilayah dan pengembangan kualitas SDM.

Studi yang dilakukan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) di daerah perbatasan Indonesia di Propinsi Sulawesi Utara, Irian Jaya dan Kalimantan Timur merupakan salah satu usaha untuk memberi asupan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan. Asupan tentang alternatif strategi pembangunan dalam laporan ini disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah perbatasan dengan fokus utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia setempat.

Terlaksananya kegiatan studi sampai selesainya penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta di tingkat pusat maupun daerah, serta aparat dan masyarakat di daerah. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Khusus kepada peneliti yang terlibat, yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan studi ini kami ucapkan selamat. Ucapan selamat dan terima kasih juga kami tujukan kepada staf administrasi dan para teknisi yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan kegiatan studi dan penulisan laporan ini.

Jakarta, Maret 1998

Kapuslitbang Kependudukan
dan Ketenagakerjaan – LIPI

DR. Yulfita Raharjo, MA
NIP: 320000878

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR RABEL | ix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan Penulisan | 3 |
| 1.3. Organisasi Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PERBATASAN | 5 |
| 2.1. Kondisi Geografis | 5 |
| 2.2. Kondisi Penduduk | 8 |
| 2.2.1. Jumlah Penduduk | 8 |
| 2.2.2. Pendidikan Penduduk | 9 |
| 2.2.3. Kegiatan Ekonomi Penduduk | 10 |
| 2.3. Kondisi Sosial | 13 |
| 2.4. Kondisi Ekonomi | 15 |

| | |
|--|----|
| BAB III. PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SANGIHE TALAUD | 19 |
| 3.1. Pembangunan Ekonomi | 19 |
| 3.2. Pembangunan Sosial | 30 |
| 3.3. Pembangunan Hankam | 33 |
| BAB IV . KONSEP DAN ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH : TINJAUAN SOSIAL DEMOGRAFI | 37 |
| 4.1. Permasalahan/Isu-isu | 37 |
| 4.2. Alternatif Pemecahan | 41 |
| BAB V. KESIMPULAN | 50 |
| DAFTAR BACAAAN | 54 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|----------|--|---------|
| Tabel 1 | Penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Daerah Kota dan Desa, Tahun 1990-1995 (Persen) | 10 |
| Tabel 2 | Penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 1990-1995 | 13 |
| Tabel 3A | Distribusi PDRB Kabupaten Sangihe-Talaud Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1990-1993 | 17 |
| Tabel 3B | Distribusi PDRB Kabupaten Sangihe-Talaud Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994-1995 | 17 |
| Tabel 4A | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sangihe-Talaud Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1990-1993 | 18 |
| Tabel 4B | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sangihe-Talaud Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1994-1995 | 18 |

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 5 | Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kelapa, Cenkeh, Pala dan Kako Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995 | 20 |
| Tabel 6 | Perkembangan Luas Panen dan Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995 | 23 |
| Tabel 7 | Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Ikan Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1996 | 25 |
| Tabel 8 | Realisasi Antar Pula Beberapa Komoditi Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995 | 27 |
| Tabel 9 | Jumlah Kunjungan Kapal, Penumpang dan Barang di Pelabuhan-Pelabuhan yang Ada di Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995 | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penikmat dari hasil pembangunan. Ini tergambar dari pengertian pembangunan yang diartikan sebagai usaha untuk merubah keadaan masa lalu yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990). Dari pengertian tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masa kini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup manusia sekarang ini dengan tidak mengganggu/membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan isu kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (United Nations, 1995: 12). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, manusia, sumberdaya alam dan lingkungan harus diperhitungkan secara berimbang. Sumber daya alam mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya, sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di samping upaya pemanfaatan dan pengembangan teknologi.

Sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga Filipina, Kabupaten Sangihe Talaud di Propinsi Sulawesi Utara seperti halnya daerah perbatasan lainnya di Indonesia merupakan daerah yang terisolir yang sulit dicapai dan dalam berbagai aspek

pembangunan selalu tertinggal dari daerah lainnya. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga maka daerah ini dapat dikatakan sebagai daerah rawan, sebagai tempat bertemunya pengaruh-pengaruh dua negara yang berbeda kepentingan/ideologi dan rentan terhadap timbulnya konflik. Selain itu, keluar masuknya orang-orang secara ilegal, perdagangan gelap, penyelundupan dan ancaman bahaya subversi yang dapat membahayakan keamanan merupakan beberapa contoh adanya pengaruh negatif. Ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan menjadi semakin kompleks.

Kabupaten Sangihe-Talaud merupakan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 100 pulau. Wilayahnya menghampar dari semenanjung Sulawesi Utara hingga bagian selatan Pulau Mindanao Republik Filipina. Luas wilayah lautnya meliputi hampir 44.000 km², sementara luas wilayah daratannya hanya sekitar 2.265 km². Sebagai daerah kepulauan, wilayah ini mempunyai kekayaan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut yang melimpah. Sumber daya alam lain yang juga berpotensi dikembangkan adalah hasil perkebunan, seperti kelapa, pala dan cengkeh. Selain itu, daerah ini juga mempunyai potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi aset pariwisata. Semua potensi yang dimiliki ini dapat dijadikan modal utama dalam pembangunan wilayah dengan pengelolaan yang ditunjang oleh sumber daya manusia.

Karena keterisoliran dan tertinggal dalam aspek pembangunan menyebabkan potensi sumber daya manusia di daerah ini masih relatif rendah dilihat dari kualitas, kuantitas dan persebarannya. Persebaran penduduknya sangat tidak merata dengan kepadatan penduduk yang juga rendah. Tingkat pendidikan penduduk daerah ini masih rendah, sebagian besar tidak sekolah dan tidak tamat SD. Selain masalah pendidikan, permasalahan lain yang berhubungan dengan kependudukan adalah masalah mobilitas penduduk, baik internal maupun internasional. Mobilitas penduduk ini tidak hanya menyangkut perpindahan fisik individu, tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan daerah tersebut. Ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan mengakibatkan perpindahan penduduk secara berangsur-angsur meninggalkan desa-desa di daerah perbatasan menuju daerah pemukiman yang relatif memiliki hubungan lebih mudah ke perkotaan di wilayah Indonesia lainnya. Hal ini mengakibatkan daerah perbatasan menjadi 'kosong', yang dari segi pertahanan dan keamanan merupakan

suatu kelemahan. Di samping itu kesenjangan pembangunan yang terjadi antara desa-kota di wilayah perbatasan dengan desa-kota di negara tetangga dan jarak yang dekat ke pusat-pusat pertumbuhan di negara tetangga menyebabkan penduduk wilayah perbatasan berorientasi ke negara tetangga. Selanjutnya, mobilitas lintas batas internasional yang tinggi mengakibatkan masyarakat daerah perbatasan banyak memahami perkembangan dan pembangunan di negara tetangga serta secara tidak langsung juga dapat membandingkan dengan keadaan di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan akibat positif maupun negatif ditinjau dari berbagai dimensi.

Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, menjadi sangat penting bukan saja berkaitan dengan masalah persebaran penduduk yang tidak sesuai dengan daya dukung wilayah, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan wilayah. Kebijakan-kebijaksanaan sektoral yang tidak bertujuan untuk intervensi pada persebaran penduduk dapat mempunyai dampak besar terhadap pada pola mobilitas serta persebaran penduduk di wilayah perbatasan. Kondisi ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap situasi di wilayah perbatasan. Ketidakmampuan sumber daya manusia setempat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan lestari untuk mendukung program-program pembangunan yang ada akan menyebabkan mobilitas penduduk ke luar semakin besar. Bersamaan dengan itu, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak optimal oleh penduduk setempat akan juga memancing pihak-pihak luar memanfaatkan potensi tersebut untuk melakukan pencurian kekayaan laut dan tidak menutup kemungkinan adanya pendudukan pada daerah-daerah tertentu yang tidak ada penghuninya. Di samping itu kondisi ini juga akan semakin memperlebar kesempatan adanya perdagangan ilegal dan penyelundupan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian Masalah Kependudukan di Daerah Perbatasan yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) di Propinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan asupan bagi pemerintah, khususnya

pemerintah daerah dalam melaksanakan usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe-Talaud, yang merupakan perbatasan Indonesia dan Filipina. Dalam mengembangkan strategi alternatif, selain aspek kesejahteraan, pertahanan keamanan dan kerjasama dengan negara tetangga yang juga akan dilihat adalah aspek kependudukan yang menyangkut mobilitas penduduk. Tinjauan aspek mobilitas penduduk penting dalam pengembangan alternatif strategi pembangunan karena studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mobilitas penduduk, baik internal maupun internasional sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan, sosial dan politik di daerah perbatasan.

1.3. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi kedalam lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan pentingnya tujuan penyusunan alternatif konsep strategi pembangunan wilayah perbatasan. Uraian tentang potensi yang dimiliki oleh daerah perbatasan Kabupaten Sangihe Talaud akan disajikan dalam Bab dua. Dalam menyajikan potensi daerah ini akan dibagi kedalam empat aspek yaitu geografis, kependudukan, sosial dan pertahanan dan keamanan. Bab tiga dari tulisan ini berisi uraian tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dari analisa dari Bab dua dan Bab tiga kemudian disusun konsep alternatif strategi pembangunan daerah yang akan disajikan dalam Bab empat. Penyusunan konsep dan alternatif strategi ini dimaksudkan untuk memberikan asupan pada pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan dengan fokus utama peningkatan kualitas sumber daya manusia setempat. Bab terakhir dari tulisan ini adalah kesimpulan yang merupakan rangkuman dari permasalahan dan alternatif pemecahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PERBATASAN

Wilayah perbatasan mempunyai peranan penting bagi keutuhan dan ketahanan nasional. Kerawanan di wilayah perbatasan akan membahayakan bagi kestabilan nasional dan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh negara dan bangsa lain demi kepentingannya. Oleh sebab itu pembangunan wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian dan pelaksanaannya harus terencana, terarah dan terintegrasi. Untuk merencanakan pembangunan yang terarah dan terintegrasi diperlukan informasi mengenai potensi-potensi dan kendala-kendala yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pada bab ini akan dibahas mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sangihe Talaud. Potensi-potensi akan dilihat dari kondisi geografis, kondisi penduduk dan sumber daya manusia, kondisi sosial dan kondisi ekonomi.

2.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Sangihe Talaud merupakan wilayah kepulauan yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara dan merupakan salah satu daerah perbatasan yang ada di Indonesia karena secara langsung berbatasan dengan Negara Filipina. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan ini dengan jumlah pulau sekitar 77 buah pulau. Bahkan menurut data terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah pulau menjadi 124 yang terdiri dari 44 pulau berpenduduk dan 80 buah pulau tidak berpenduduk (Bappeda, 1995). Dari sekian banyak pulau tersebut terdapat dua buah pulau yang tergolong besar yaitu Sangir Besar dan Karakelang. Berdasarkan pembagian wilayah administratif Kabupaten Sangihe Talaud dibagi menjadi 3 wilayah Pembantu Bupati (Siu-

Tagulandang, Sangihe Besar dan Talaud), 16 wilayah kecamatan dan 132 desa/kelurahan. Selain itu, terdapat pula wilayah kecamatan khusus yang berkaitan dengan wilayah perbatasan yaitu Border Crossing Area (BCA) Marore dan Miangas.

Wilayah khusus tersebut dibentuk sesuai dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Filipina dengan Pemerintah Indonesia. Pada awalnya dibentuk 3 unit BCA, namun sekarang ini hanya satu BCA yang berfungsi yaitu BCA Marore. Terdapat dua wilayah kecamatan yang secara khusus termasuk dalam unit BCA Marore, yaitu Kecamatan Tabukan Utara (meliputi desa Tinakareng, Dalaweng, Enggohe, dan Marore) dan Kecamatan Kendahe (meliputi desa Kawio, Kawaluso, dan Lipang). Dengan adanya ketentuan itu maka bagi pengunjung atau pelintas batas (dari Filipina) yang berada di wilayah Indonesia hanya boleh berada pada daerah-daerah tersebut. Demikian pula penduduk Sangir yang bermukim di daerah-daerah tersebut yang diperbolehkan berkunjung ke Filipina (wilayah BCA Batuganding dan Pulau Balut) dengan menggunakan pas lintas batas sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Sumber daya alam di wilayah Sangihe Talaud merupakan potensi untuk menunjang pembangunan, namun nampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Sangihe-Talaud merupakan wilayah bahari dengan luas lautnya sekitar 44.000 km² atau sekitar 95 persen dari luas wilayah. Wilayah daratan yang luasnya sekitar 2,3 ribu Km², topografinya kasar. Hampir 75 persen wilayah daratan mempunyai kemiringan di atas 15 derajat, bahkan terdapat 41 persen daratan yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 derajat. Jadi hanya sekitar 25 persen daratan yang mempunyai kemiringan kurang dari 15 derajat yang sebagian besar berada pada dataran pantai terutama di Pulau Karakelang.

Wilayah daratan dimanfaatkan penduduk untuk membudidayakan tanaman perkebunan rakyat. Tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat di wilayah ini pada umumnya adalah kelapa, cengkih dan pala. Terdapat pula beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di wilayah ini seperti coklat, panili, kopi dan jambu mete karena beberapa wilayah cocok untuk pengembangan tanaman tersebut. Selain tanaman perkebunan, perkembangan tanaman pangan cukup baik di wilayah ini.

Tanaman yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan sayuran. Namun demikian, produksi tanaman pangan dan sayuran yang ada belum mencukupi kebutuhan pangan penduduk sehingga harus didatangkan dari luar wilayah ini.

Wilayah Sangihe Talaud terdapat hutan yang terdiri dari hutan lindung (30.000 ha.), hutan suaka alam (21.800 Ha.), hutan produksi terbatas (22.500 Ha.), hutan produksi yang dapat dikonversi (15.250 Ha.), dan hutan bakau. Sebagian hutan terdapat di Pulau Karakelang dengan tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi seperti kayu eboni, kayu besi, kayu linggua, kayu melengku, kayu raja dan kayu sui. Namun akhir-akhir ini kayu tersebut semakin langka karena sudah banyak diambil penduduk tanpa upaya pelestarian. Hasil hutan lain yang potensial adalah rotan, bambu dan sagu. Beberapa perusahaan sudah mulai mengupayakan budidaya rotan khususnya di daerah Essang, Beo, Rainis dan Lirung. Dalam upaya budidaya rotan masyarakat setempat diikutsertakan sehingga merupakan suatu keuntungan bagi penduduk setempat.

Wilayah laut yang luas merupakan potensi pula bagi pengembangan ekonomi penduduk. Wilayah laut di sekitar Sangihe Talaud diperkirakan memiliki sumber daya hayati laut seperti berbagai jenis ikan, moluska, rumput laut, terumbu karang yang cukup melimpah. Menurut informasi dari Dinas Perikanan Dati I Sulut daerah ini juga cocok untuk pengembangan budidaya rumput laut dengan luas diperkirakan mencapai 1.240 Ha. Selain itu, daerah ini juga cocok untuk budidaya ikan dan udang tambak, namun masih sangat terbatas yang dimanfaatkan yaitu diperkirakan hanya sekitar 100 Ha.

Wilayah Sangihe Talaud ini mempunyai keindahan panorama gunung, pantai dan laut yang merupakan salah satu potensi untuk pengembangan ekowisata. Di wilayah ini terdapat pegunungan di dasar laut, diantaranya adalah Gunung Mahangetang yang mempunyai pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, kawasan lautan di daerah ini banyak mempunyai terumbu karang yang beraneka ragam spesiesnya yang menarik bagi para penyelam.

2.2. Kondisi Penduduk

Dalam merencanakan suatu pembangunan kondisi penduduk setempat menjadi salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dengan mengetahui kualitas penduduk dan kondisi sumber daya alam yang ada maka dapat ditentukan rencana dan jenis pembangunan yang cocok, terarah dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dalam mendiskripsikan kondisi penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud aspek yang akan dilihat diantaranya adalah jumlah dan perkembangan penduduk, pendidikan dan kegiatan ekonominya.

2.2.1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Sangihe-Talaud dengan luas wilayah 2.263,95 km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan berpenduduk sekitar 260.404 jiwa pada tahun 1990 dan naik menjadi 267 580 jiwa pada tahun 1995. Kondisi alamnya yang berpulau-pulau serta sarana dan prasarana yang berbeda antar pulau menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Umumnya kecamatan-kecamatan yang terletak di Sangir Besar mempunyai kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang terletak di pulau Karakelang dan pulau-pulau kecil lainnya. Menurut hasil registasi penduduk tahun 1996, sekitar 50,2 persen penduduk tinggal di Pulau Sangir Besar yang luasnya sekitar 32,5 persen dari luas wilayah dengan kepadatan penduduk 179 orang per km². Pulau Karakelang yang luasnya lebih besar (37,5 persen dari luas wilayah) dihuni oleh 27,9 persen penduduk dengan kepadatan sekitar 57 orang per km². Sementara itu secara keseluruhan kepadatan penduduk adalah 116,5 per km².

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sangihe Talaud pada periode 1980-1990 sebesar 0,88 persen per tahun. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara secara keseluruhan yang pada periode 1980-1990 angka pertumbuhannya sebesar 1, 6 persen. Rendahnya pertumbuhan penduduk di kabupaten ini kemungkinan lebih disebabkan adanya migrasi keluar daripada pertumbuhan alami yaitu selisih antara kelahiran dan kematian. Tingkat kelahiran (TFR)

di Kabupaten Sangihe Talaud sebesar 2,96 merupakan angka tertinggi ke dua di seluruh kabupaten di Propinsi Sulawesi Utara.

2.2.2. Pendidikan penduduk

Pendidikan penduduk adalah salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun telah terjadi peningkatan selama periode 1990-1995, secara umum tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud masih rendah. Data menunjukkan bahwa sekitar 36,9 persen (lebih dari satu per tiga) penduduk berumur 10 tahun ke atas tidak sekolah dan tidak tamat SD. Penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA masing-masing 17,9 persen dan 12,5 persen. Selama periode 1990-1990 terjadi penurunan jumlah penduduk yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 9 persen diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk berpendidikan SLTP dan SLTA. Di daerah perkotaan telah terjadi penurunan jumlah penduduk berpendidikan SLTP yang diikuti oleh dengan peningkatan jumlah penduduk berpendidikan SLTA sebesar 10 persen. Penduduk berpendidikan universitas juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat (dari 1,5 persen menjadi 3,5 persen). Sementara itu di daerah pedesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA serta perguruan tinggi. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak setinggi di daerah perkotaan. Kondisi ini mencerminkan adanya beberapa indikasi, salah satu diantaranya adalah fasilitas pendidikan tingkat lanjutan (SLTP dan STA) belum merata sampai ke desa-desa. Fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sangihe-Talaud umumnya telah sampai ke desa-desa bahkan di pulau-pulau terpencil. Namun tidak demikian halnya dengan fasilitas sekolah lanjutan, belum merata dan menjangkau semua daerah terpencil. Kemungkinan lainnya adalah penduduk berpendidikan pindah ke daerah perkotaan yang dianggap sebagai daerah yang mempunyai peluang kesempatan kerja lebih baik.

Tabel 1: Penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan, Tahun 1990-1995 (Persen)

| Pendidikan tertinggi yang ditamatkan | Laki-laki | | Perempuan | | Laki-laki dan Perempuan | |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 |
| Kota+Desa | | | | | | |
| Tidak pernah sekolah/tdk tamat SD | 47,3 | 35,9 | 46,9 | 37,8 | 47,1 | 36,9 |
| SD | 29,4 | 30,3 | 29,8 | 31,3 | 29,6 | 30,7 |
| SLTP | 13,8 | 19,1 | 13,6 | 16,7 | 13,6 | 17,9 |
| SLTA | 8,6 | 12,5 | 8,9 | 12,5 | 8,7 | 12,5 |
| Akademi/Diploma | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
| Universitas | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N | 103 187 | 110 216 | 101 263 | 107 250 | 204 450 | 217 466 |
| Kota | | | | | | |
| Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD | 28,3 | 16,8 | 24,9 | 21,1 | 26,8 | 19,3 |
| SD | 21,3 | 20,1 | 25,6 | 26,5 | 24,3 | 23,8 |
| SLTP | 24,7 | 24,2 | 22,5 | 14,8 | 23,6 | 18,8 |
| SLTA | 23,3 | 28,4 | 21,6 | 35,2 | 22,4 | 32,3 |
| Akademi/Diploma | 1,6 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | 2,2 |
| Universitas | 0,7 | 6,3 | 2,30 | 1,6 | 1,5 | 3,6 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N | 4 095 | 4 370 | 7 782 | 5 888 | 8 053 | 10 258 |
| Desa | | | | | | |
| Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD | 48,0 | 36,8 | 47,7 | 38,8 | 47,9 | 37,7 |
| SD | 29,8 | 30,7 | 29,9 | 31,5 | 29,8 | 31,2 |
| SLTP | 13,4 | 18,9 | 13,1 | 16,8 | 13,3 | 17,8 |
| SLTA | 8,1 | 11,8 | 8,4 | 11,2 | 8,3 | 11,6 |
| Akademi/Diploma | 0,5 | 0,9 | 0,20 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Universitas | 0,2 | 1,0 | 0,20 | 0,9 | 0,2 | 0,9 |
| N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah | 99 282 | 105 846 | 97115 | 101 362 | 196 397 | 207 208 |

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia Seri S No. 23 990 Tabel 06.1 - 06.9 Hal. 25-33
SUPAS 1995 Seri S2.22 Tabel 07.1-07. 9 Hal 32-40.

2.2.3. Kegiatan ekonomi penduduk

Kegiatan penduduk berumur 10 tahun ke atas dapat digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mencari kerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang masih sekolah, ibu rumah tangga, pensiun dan lain-lain. Jumlah angkatan

kerja di Kabupaten Sangihe Talaud pada tahun 1980 sebesar 76.117 orang meningkat menjadi 107 762 orang pada tahun 1990 dengan pertumbuhan per tahun sebesar 3,48 persen. Pada tahun 1995 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 124 522 orang atau meningkat sebesar 16 760 orang selama lima tahun.

Dari sekitar 124 522 angkatan kerja tersebut yang bekerja sekitar 108 754 orang dan sebagian besar (61,6 persen) masuk dalam lapangan pekerjaan pertanian. Sektor pertanian di daerah ini yang terutama adalah usaha perkebunan (tanaman keras seperti kelapa, pala dan cengkeh). Keterlibatan perempuan dalam pengolahan lahan pertanian ini cukup besar, sedangkan pada usaha perikanan umumnya didominasi oleh laki-laki. Selama lima tahun (1990-1995) jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 5,4 persen. Sektor lain yang juga mengalami penurunan jumlah angkatan kerjanya adalah sektor industri pengolahan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor ini selama lima tahun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Sektor-sektor yang jumlah angkatan kerjanya menunjukkan peningkatan adalah perdagangan, jasa dan bangunan (Tabel 2). Lapangan pekerjaan yang cukup menyerap tenaga kerja selain sektor pertanian adalah sektor jasa dan perdagangan, masing-masing 15,6 persen dan 9,7 persen.

Dari Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih besar pada laki-laki (9 persen) dari pada perempuan (2,2 persen). Perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan peningkatan tingkat pendidikan penduduk. Peningkatan pendidikan penduduk laki-laki (terutama SLTP keatas) lebih besar dibandingkan peningkatan pendidikan perempuan. Mereka yang telah mempunyai pendidikan SLTA keatas cenderung untuk tidak mau bekerja di sektor pertanian. Pada penduduk laki-laki, penurunan jumlah yang bekerja di sektor pertanian diikuti oleh naiknya proporsi yang bekerja pada sektor lainnya, terutama sektor bangunan dan jasa, sedangkan pada penduduk perempuan penurunan tersebut dibarengi dengan peningkatan jumlah yang bergerak di sektor perdagangan.

Meskipun sebagian besar penduduk terserap di sektor pertanian, tetapi apabila diamati lebih lanjut struktur dan jenis pekerjaannya sektor ini sangat senjang komposisinya. Sektor ini kurang mempunyai tenaga profesional, kepemimpinan dan

tenaga penjualan yang handal. Dengan demikian kegiatan pertanian dalam arti luas di Kabupaten Sangihe-Talaud masih dikelola secara 'tradisional' (Aswatini. dkk: 1996). Oleh sebab itu untuk mengembangkan sektor pertanian perlu didukung oleh perencanaan pendidikan di bidang pertanian. Bidang pertanian memerlukan tenaga terdidik seperti tehnisi, kepemimpinan, penjualan dan usaha jasa pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian telah diadakan berbagai program. Diantaranya adalah program 'bekerja sambil belajar' melalui pembuatan demplot penanaman kedelai dan padi sawah di Kecamatan Beo, Rainis dan Essang di Pulau Karakelang. Dengan adanya program ini penduduk diharapkan bisa belajar sambil bekerja untuk meningkatkan pengetahuannya. Program ini cukup berhasil, ditandai dengan mulai bertambah banyak penduduk yang mengusahakan tanaman kedelai dan padi sawah. Namun karena program ini merupakan proyek yang jangka waktunya tertentu maka kelanjutannya menjadi kurang terjamin. Setelah proyek selesai pendampingan oleh PPL menjadi tidak efektif lagi sehingga hasil produksi menjadi menurun. Selain itu, penduduk juga belum mengetahui cara pengolahan kedelai setelah pasca panen.

Program lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang perikanan melalui pemberian bantuan kapal dan pelatihan penangkapan bagi kelompok nelayan. Program ini dimulai pada tahun 1992 dengan memberikan satu unit kapal bermesin 40 PK dan alat tangkapnya yang terdiri dari long line 10 basket dan gill net dua unit kepada kelompok nelayan. Di samping program bantuan alat produksi tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan BKPI (Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan) untuk memberikan ketrampilan di bidang perikanan dengan pelatihan. Pelatihan ini diadakan secara reguler sejak tahun 1993/1994 dengan satu kali pelatihan diikuti oleh 60 orang peserta.

Tabel 2: Penduduk Sangihe-Talaud Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 1990-1995

| Lapangan Pekerjaan Utama | Laki-laki | | Perempuan | | Laki-laki Perempuan | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|--------|---------------------|---------|
| | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 |
| Pertanian | 74,4 | 65,3 | 54,1 | 51,9 | 68,0 | 61,6 |
| Pertambangan | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,1 |
| Industri pengolahan | 5,5 | 5,7 | 9,2 | 3,1 | 6,6 | 5,0 |
| Listrik, air dan gas | 0,3 | 0,2 | - | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Bangunan | 5,3 | 7,1 | 0,7 | 0,2 | 3,7 | 5,2 |
| Perdagangan | 3,1 | 5,7 | 12,0 | 20,1 | 5,9 | 9,7 |
| Angkutan | 1,6 | 1,7 | - | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
| Keuangan | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Jasa kemasyarakatan | 8,7 | 13,1 | 22,8 | 22,1 | 13,1 | 15,6 |
| Jumlah | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N | 72 711 | 744 136 | 32 956 | 30 272 | 105 667 | 108 754 |

Sumber: Sensus Penduduk Seri S2.22 tabel 34.7-34.9 Hal. 208-210.dan SUPAS S2.22 Tabel 34.7-34.9 Hal.209-210.

2.3. Kondisi Sosial

Penduduk asli Kepulauan Sangihe Talaud merupakan satu kelompok etnis besar yaitu kelompok suku bangsa Sangir-Talaud. Kelompok suku bangsa ini dapat dibagi menjadi dua sub suku bangsa yaitu sub suku bangsa Sangir atau biasa di sebut dengan orang Sangir yang mendiami sekitar Sangir Besar dan sub suku bangsa Talaud yang banyak terdapat di Pulau Karakelang. Akan tetapi dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan suku bangsa lain tinggal di wilayah ini, karena wilayah ini sudah lama sebagai wilayah yang terbuka. Mereka adalah perantau yang datang dari sekitar Sulawesi Utara maupun dari luar Sulawesi Utara. Orang Sangir dan orang Talaud merasa sebagai satu suku bangsa. Pengakuan ini didasarkan pada persamaan bahasa, adat istiadat dan wilayah. Bahasa yang dapat dipakai sebagai alat pemersatu dan juga sebagai wahana interaksi diantara kedua sub etnis tersebut adalah bahasa Indonesia atau dikenal juga dengan Bahasa Melayu Manado.

Dalam kehidupan beragama masyarakat wilayah perbatasan di Kepulauan Sangihe Talaud cukup baik, toleransi beragama sangat dijunjung tinggi oleh masing-masing pemeluk agama. Di wilayah perbatasan ini masih terdapat pemeluk agama Islam Tua dan agama Islam disamping mayoritas pemeluk agama Kristen. Dalam kehidupan

bermasyarakat, mereka tidak terpengaruh oleh perbedaan keyakinan yang dianutnya dan dapat hidup berdampingan dalam melakukan aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat baik berupa perbedaan etnis, bahasa maupun agama dan kepercayaan yang sebenarnya merupakan potensi konflik bukan menjadi kendala atau hambatan di dalam kehidupan masyarakat Sangir Talaud. Hal tersebut justru dapat menjadi potensi integrasi yang dapat menyatukan masyarakat karena latar belakang yang dapat mereka pahami. Hal ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan di wilayah perbatasan. Persatuan dan kesatuan ini merupakan modal bagi pembangunan di wilayah perbatasan, selain itu sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan dan pengaruh-pengaruh dari luar.

Rasa persatuan dan kesatuan tersebut didasari oleh berbagai nilai-nilai sosial budaya yang merupakan pedoman bagi perilaku mereka untuk mewujudkan persatuan kesatuan itu sendiri. Nilai-nilai sosial budaya yang masih dijunjung tinggi keberadaannya oleh masyarakat diantaranya adalah nilai-nilai kedaerahan, kesukuan, keterikatan terhadap daerah asal, selaras dengan alam, orientasi masa lalu dan sekarang, nilai solidaritas sosial, gotong royong dan tolong menolong.

Nilai-nilai kedaerahan dan nasionalisme masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat baik terhadap negara Indonesia maupun daerah asalnya. Keterikatan terhadap negara maupun daerah asal dapat dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk Sangir Talaud yang berada di Filipina yang mempunyai keinginan untuk kembali ke daerah asalnya. Namun demikian, untuk kembali ke wilayah Sanghe Talaud dirasakan kurang memungkinkan karena terbatasnya lahan yang ada, sehingga sebagian dari mereka yang kembali dari Filipina menetap di Pulau Halmahera. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nasionalisme mereka cukup tinggi sehingga mereka memilih menetap di luar daerah asalnya.

Dalam kehidupan masyarakat Sangir Talaud mereka tidak dapat lepas dari ketergantungan dengan orang lain. Hal ini diwujudkan dalam tolong menolong dan gotong royong atau dikenal dengan *mapalus* yang terlihat dalam aktivitas kegiatan di kebun, di laut, dalam mendirikan rumah, atau dalam pesta perkawinan, kematian dan pesta-pesta adat lainnya.

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini yang mendasari kehidupan masyarakat yang sebagian besar memiliki latar belakang budaya petani tanaman keras dan nelayan. Hal ini disesuaikan dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Hidup mereka yang dicerminkan dalam pola berpikir dan tingkah laku yang masih sederhana dan tidak berlebihan. Namun demikian, mereka sebenarnya orang yang ulet dan giat bekerja. Nelayan Sangir Talaud dikenal sebagai nelayan yang tangguh terutama nelayan penangkap ikan hiu. Keinginan untuk maju dan bekerja keras juga mereka tunjukkan ketika mereka berada di Filipina. Mereka di Filipina dikenal sebagai petani kebun (tanaman keras) yang sukses.

Selain memiliki nilai-nilai luhur yang masih dipegang teguh masyarakat, mereka juga mempunyai potensi budaya berupa kesenian, kerajinan dan ketrampilan yang merupakan wujud dari kreativitas masyarakat. Berbagai macam kesenian berupa tarian atau pun seni musik dikenal dalam masyarakat ini. Masyarakat Sangir Talaud dikenal juga sebagai pengrajin kayu hitam serta trampil dalam membuat perahu maupun kapal. Pengetahuan mereka dalam membuat perahu dan kapal masih sangat sederhana akan tetapi perahu dan kapal yang dihasilkan telah teruji dapat berlayar melawan ganasnya ombak di lautan.

2.4. Kondisi Ekonomi

Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah antara lain dapat dilihat dari distribusi produk domestik regional brutto (PDRB). Data PDRB sebagai dasar pengukuran perekonomian daerah yang disajikan pada Tabel 3A berdasarkan harga konstan tahun 1983 sedangkan pada Tabel 3B berdasarkan harga konstan tahun 1993. Data distribusi PDRB dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 yang tersaji pada Tabel 3B tersebut dari segi penghitungan dan cakupan sektoral mengalami penyempurnaan dibandingkan seri lama (berdasarkan harga konstan tahun 1983). Seri lama terdiri dari 11 sektor, sementara itu data PDRB tahun 1994-1995 terdiri dari 9 sektor. Dalam seri baru tersebut sektor sewa rumah dimasukkan dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor pemerintahan dan hankam digabungkan ke dalam sektor jasa. Melihat distribusi PDRB Kabupaten Sangihe Talaud dapat diketahui bahwa struktur

perekonomian daerah ini sangat tergantung pada sumbangan sektor pertanian dalam arti luas. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 1990-1995 berkisar antara 36 persen sampai dengan 40 persen. Namun demikian selama kurun waktu tersebut sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Apabila dirinci, dari sektor pertanian tersebut yang cukup memberikan kontribusi besar adalah sub-sektor perkebunan, diikuti dengan sub-sektor tanaman pangan dan perikanan.

Walaupun menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, sektor pemerintahan umum memberikan sumbangan terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan komunikasi menempati urutan ketiga dan ke empat. Dari analisa distribusi PDRB tersebut dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Sangihe Talaud masih sangat tergantung dari pemanfaatan secara langsung sumber daya alam yang dimiliki (sektor primer). Sektor industri dan jasa (sekunder dan tertier) masih sangat kecil sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dilihat pertumbuhannya per sektor, data tahun 1990-1995 menunjukkan bahwa hampir semua sektor pertumbuhannya berfluktuasi. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan cukup besar selama periode tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi serta listrik, gas dan air. Sektor jasa-jasa (termasuk pemerintahan) dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Sangihe-Talaud, akan tetapi dilihat perkembangannya tampaknya sektor-sektor tersebut kurang bisa diandalkan karena pertumbuhannya rendah.

Tabel 3A: Distribusi PDRB Kabupaten Sangihe dan Talaud Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1990-1993.

| Lapangan Usaha | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian | 39,68 | 41,65 | 43,18 | 42,64 |
| • <i>Tanaman pangan</i> | 11,05 | 10,87 | 9,95 | 9,26 |
| • <i>Tanaman perkebunan</i> | 19,17 | 21,61 | 23,80 | 24,08 |
| • <i>Perikanan</i> | 3,93 | 3,85 | 4,43 | 4,65 |
| Pertambangan dan penggalian | 1,16 | 1,23 | 1,37 | 1,47 |
| Industri pengolahan | 1,47 | 1,38 | 1,36 | 1,40 |
| Listrik, gas dan air | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 |
| Bangunan | 5,19 | 5,01 | 4,86 | 5,00 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 11,85 | 11,69 | 11,95 | 12,73 |
| • <i>Perdagangan</i> | 11,12 | 10,99 | 11,29 | 12,05 |
| Angkutan dan komunikasi | 5,97 | 6,43 | 6,77 | 7,08 |
| • <i>Angkutan darat</i> | 2,39 | 2,64 | 2,75 | 2,76 |
| • <i>Angkutan laut</i> | 3,43 | 3,65 | 3,87 | 4,18 |
| Bank dan lembaga keuangan | 1,70 | 1,68 | 1,07 | 1,04 |
| Sewa rumah | 3,38 | 3,20 | 3,06 | 2,96 |
| Pemerintah dan Hankam | 19,69 | 18,49 | 17,44 | 17,16 |
| Jasa-jasa | 9,56 | 8,87 | 8,54 | 8,12 |
| <i>Jasa sosial kemasyarakatan</i> | 8,60 | 7,96 | 7,66 | 7,27 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Bappeda TK II, Kepulauan Sangihe dan Talaud, 1994 Tabel 2.1. Hal 10.
Catatan: berdasarkan harga konstan 1983

Tabel 3B: Distribusi PDRB Kabupaten Sangihe dan Talaud Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994-1995 (Persen)

| Lapangan Usaha | 1994 | 1995 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Pertanian | 37,58 | 36,70 |
| • <i>Tanaman pangan</i> | 7,58 | 7,27 |
| • <i>Tanaman perkebunan</i> | 20,01 | 20,62 |
| • <i>Perikanan</i> | 6,16 | 5,99 |
| Pertambangan dan penggalian | 3,50 | 3,67 |
| Industri pengolahan | 2,38 | 2,41 |
| Listrik, gas dan air | 0,29 | 0,31 |
| Bangunan | 8,27 | 8,51 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 11,06 | 11,35 |
| • <i>Perdagangan</i> | 10,26 | 10,55 |
| Angkutan dan komunikasi | 10,67 | 11,39 |
| • <i>Angkutan darat</i> | 3,76 | 4,01 |
| • <i>Angkutan laut</i> | 6,38 | 6,86 |
| Keuangan, persewaan, jasa perusahaan | 3,36 | 3,29 |
| • <i>Sewa rumah</i> | 2,25 | 2,21 |
| Jasa-jasa | 22,89 | 22,36 |
| • <i>Pemerintahan umum</i> | 21,04 | 20,46 |
| Jumlah | 100 | 100 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud 1996, Tabel 11.4 Hal. 448
Catatan: berdasarkan harga konstan 1993.

Tabel 4A: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sangihe Talaud Menurut Lapangan Usaha, 1990-1993 (Persen)

| Lapangan Usaha | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian | 15,87 | 15,56 | 13,22 | 10,45 |
| Pertambangan dan penggalian | 27,40 | 17,68 | 20,87 | 20,97 |
| Industri pengolahan | 9,42 | 3,18 | 8,01 | 15,06 |
| Listrik, gas dan air | 8,72 | 11,56 | 15,77 | 12,37 |
| Bangunan | 3,05 | 6,36 | 5,91 | 15,00 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 8,51 | 8,60 | 11,65 | 19,14 |
| Angkutan dan komunikasi | 11,51 | 18,67 | 14,90 | 17,00 |
| Bank dan lembaga keuangan | 23,82 | 8,83 | 30,39 | 8,34 |
| Sewa rumah | 3,65 | 4,32 | 4,56 | 8,24 |
| Pemerintah dan Hankam | 3,36 | 3,36 | 3,03 | 10,02 |
| Jasa-jasa | 2,52 | 2,19 | 5,05 | 6,38 |
| PDRB | 9,72 | 10,10 | 9,20 | 11,85 |

Sumber: Bappeda TK II, Kabupaten Sangihe Talaud, 1994: Tabel 2.3. Hal. 12

Catatan: berdasarkan harga konstan 1983

Tabel 4B: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sangihe Talaud Menurut Lapangan Usaha, 1994-1995 (Persen)

| Lapangan Usaha | 1994 | 1995 |
|---------------------------------|-------|-------|
| Pertanian | 8,23 | 9,36 |
| Pertambangan dan penggalian | 16,30 | 17,43 |
| Industri pengolahan | 10,16 | 13,12 |
| Listrik, gas dan air | 09,38 | 18,65 |
| Bangunan | 8,59 | 15,20 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 11,99 | 14,97 |
| Angkutan dan komunikasi | 16,22 | 19,45 |
| Bank dan lembaga keuangan | 8,60 | 9,87 |
| Jasa-jasa | 17,80 | 9,42 |
| PDRB | | |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996. Tabel 11.8 Hal. 452.

Catatan: Berdasarkan harga konstan 1993

BAB III

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SANGIHE-TALAUD

Bab ini berisi uraian mengenai pembangunan yang sudah dilaksanakan dan pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sangihe-Talaud. Dalam uraian ini juga diketengahkan beberapa permasalahan dan kendala yang ada menyangkut pemanfaatan potensi daerah. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, uraian mengenai pembangunan ekonomi, diikuti dengan pembangunan sosial dan yang terakhir pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan.

3.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh potensi-potensi sumber daya alam yang ada dan dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Gambaran pembangunan ekonomi yang telah dilakukan di Kabupaten Sangihe Talaud akan dilihat dari pemanfaatan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Berikut ini akan diulas beberapa sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB dan sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Sektor pertanian

Seperti terlihat dalam distribusi PDRB, sub-sektor perkebunan merupakan komoditi unggulan. Komoditi penting sub-sektor perkebunan dari Kabupaten Sangihe Talaud adalah kelapa, cengkeh dan pala. Mulai tahun 1990-an kakao menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagai tanaman perkebunan rakyat. Ke empat komoditi tersebut telah lama dibudidayakan penduduk sebagai tanaman perkebunan rakyat. Budidaya tanaman perkebunan rakyat ini menyebar di 16 kecamatan dengan luas areal 4 980 ha, 7.655 ha dan 42.302 ha berturut-turut untuk cengkeh, pala dan kelapa. Dari 16 kecamatan tersebut hanya ada 7 kecamatan yang areal tanamannya cukup menonjol, yaitu: Tabukan Utara, Tabukan Selatan, Tamako, Lirung, Tagulandang, Beo, dan Rainis. Hasil produksi keempat komoditi unggulan dari kabupaten ini menunjukkan jumlah yang bervariasi dari tahun ke tahun dan peningkatannya tampaknya sangat tergantung pada perluasan areal tanam (Tabel 5).

Tabel 5: Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kelapa, Cengkeh, Pala, dan Kakao Kabupaten Sangihe dan Talaud, Tahun 1990-1995

| Tahun | Kelapa | | Cengkeh | | Pala | | Kakao | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Luas Panen (ha) | produksi (ton) | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (ha) | produksi (ton) | Luas Panen (ha) | produksi (ton) |
| 1990 | 40 944 | 37 912 | 4 910 | 343 | 7 591 | 5 183 | 812 | 17 |
| 1991 | 41 649 | 36 243 | 4 907 | 2 305 | 7 692 | 4 721 | 1 646 | 25 |
| 1992 | 42 104 | 39 142 | 4 903 | 1 590 | 7 684 | 5 187 | 2 439 | 99 |
| 1993 | 42 302 | 40 225 | 4 902 | 948 | 7 683 | 5 706 | 2 764 | 125 |
| 1994 | 43 452 | 40 580 | 4 980 | 2 480 | 7 773 | 5 717 | 2 974 | 592 |
| 1995 | 43 827 | 40 650 | 4 980 | 2 556 | 7 772 | 5 951 | 3 034 | 610 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996. Tabel 5.2.1 dan 5.2.2. Hal. 183-186.

Luas areal tanaman kelapa selama lima tahun (1990-1995) meningkat sekitar 3.000 ha dan peningkatan hasil produksinya sekitar 2700 ton. Jenis kelapa yang dibudidayakan oleh rakyat adalah jenis pohon kelapa dalam bukan kelapa hibrida. Ini dikarenakan antara lain umumnya lebih panjang dan tidak memerlukan pemeliharaan yang

khusus. Padahal jenis kelapa hibrida ini apabila dipelihara secara intensif hasilnya akan bagus. Selain itu, kendala dalam usaha tanaman kelapa adalah adanya hama *sexava* spp (Whitten, 1986: 599). Populasi *sexava* di daerah ini sulit diberantas karena sudah merupakan daerah endemi. Hama ini menyerang tanaman kelapa penduduk dan susah diberantas karena umumnya tanah di sekeliling pohon tidak pernah diolah. Apabila tanah diolah maka populasi *sexava* yang bertelur akan punah. Cara mengolah tanah di sekitar pohon diantaranya adalah dengan menanam pohon kakao atau padi gogo. Selain itu, hama ini juga akan berkurang jika kebersihan lingkungan di bawah pohon kelapa ini dijaga.

Dalam rangka meningkatkan produksi kelapa telah diadakan program peremajaan yang dilakukan terutama di sentra-sentra penghasil kelapa seperti Kecamatan Tabukan Utara, Tahuna dan Kendahe. Program ini dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala. Kendala tersebut salah satu diantaranya adalah keberhasilannya tergantung pada partisipasi petani. Permasalahannya adalah partisipasi petani tergantung dari fluktuasi harga kelapa. Kalau harga kelapa naik, maka petani akan berpartisipasi aktif dengan menanam pohon kelapa atas biaya sendiri. Sebaliknya, meskipun petani mendapat bibit secara gratis akan tetapi kalau harga kelapa sedang turun maka umumnya mereka enggan untuk berpartisipasi.

Produksi cengkeh terlihat sangat bervariasi karena tanaman ini sangat tergantung pada musim. Mulai tahun 1990-an tanaman cengkeh di daerah ini tidak dirawat sebagaimana mestinya karena anjloknya harga. Luas areal tanamnya juga cenderung tidak bertambah selama lima tahun. Upah memetik cengkeh tidak seimbang dengan harga jual sehingga penduduk cenderung untuk tidak memetik dan bahkan ada yang menggantinya dengan tanaman lain yang lebih menghasilkan. Sebagai gambaran harga cengkeh pada tahun 1991 sebesar Rp 4 936 turun menjadi Rp 2 297 pada tahun 1995 atau turun sebesar 53 persen (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996: 287). Ini semua mengakibatkan produksi cengkeh terus mengalami penurunan, meskipun pada tahun 1994 mulai tampak ada kenaikan.

Pala dari daerah ini terkenal bagus kualitasnya sehingga tidak ada permasalahan dalam pemasaran. Luas areal tanaman pala selama lima tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, akan tetapi produksinya mengalami kenaikan. Berbeda dengan harga cengkeh, harga pala cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan penduduk tetap membudidayakan dan berusaha untuk meningkatkan produksi. Di samping itu, hasil sampingan dari pala ini yaitu fulli cukup memberikan keuntungan. Harga fulli mengalami kenaikan lebih dari 280 persen. Pada tahun 1991 harga fulli Rp 2.500 naik menjadi Rp Rp 7. 098 1995 (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996: 287).

Tanaman kakao mulai berkembang di daerah ini sejak tahun 1990-an dan luas areal panennya menunjukkan perkembangan dari tahun ketahun. Belum semua kecamatan di Kabupaten Sangihe Talaud dapat menghasilkan kakao. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai luas areal panen kakao yang cukup menonjol adalah Beo, Lirung, Rainis dan Essang di Pulau Karakelang. Sedangkan di pulau Sangir besar kakao baru mulai banyak dikembangkan di Tabukan Utara dan Kendahe. Pada tahun luas panen 1990 hanya sekitar 800 ha naik menjadi sekitar 3 030 ha pada tahun 1995. Produksinya juga menunjukkan kenaikan dari hanya sekitar 17 ton menjadi sekitar 600 ton. Untuk meningkatkan produksi kakao telah diadakan program P2WK (perkembangan perkebunan wilayah khusus) di Kecamatan Rainis, Lirung, Essang dan Melongguane (di Pulau Karakelang) dan Kecamatan Tahuna, Kendahe, dan Kentar (di Pulau Sangir). Program ini meliputi pemberian bibit, biaya tanam dan saprodi selama satu tahun dan dilaksanakan pada lahan seluas 2347 ha dan melibatkan sekitar 2 876 kepala keluarga.

Dari data mengenai potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Sangihe Talaud menunjukkan bahwa peningkatan produksi sangat tergantung pada perluasan areal tanam. Ini menunjukkan bahwa usaha intensifikasi belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi masih usaha intensifikasi pertanian perlu lebih digalakkan lagi.

Tabel 6: Perkembangan Luas Panen dan Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995

| Tahun | Padi | | Jagung | | Kacang Tanah | | Kacang Kedelai | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Luas Panen (ha) | produksi (ton) | Luas Panen (ha) | produksi (ton) | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (ha) | produksi (ton) |
| 1990 | 398 | 558 | 168 | 468 | 351 | 462 | 130 | 104 |
| 1991 | 455 | 726 | 170 | 476 | 421 | 384 | 105 | 78 |
| 1992 | 542 | 775 | 215 | 535 | 439 | 395 | 131 | 78 |
| 1993 | 545 | 959 | 435 | 1 174 | 500 | 452 | 154 | 116 |
| 1994 | 524 | 775 | 440 | 1 255 | 508 | 471 | 157 | 118 |
| 1995 | 715 | 819 | 450 | 1 314 | 553 | 516 | 232 | 127,9 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996. Tabel 5.2.1 dan 5.2.1. Hal 176-179.

Hasil pertanian dari sub-sektor tanaman pangan dari kabupaten ini adalah padi-padian dan palawija seperti jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian dan tanaman hortikultura (Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Sangihe-Talaud, 1994). Sumbangan dari sub-sektor ini terhadap PDRB selama periode 1990-1995 tampak menunjukkan penurunan (dari sekitar 11 persen pada tahun 1990 menjadi 7 persen pada tahun 1995). Tanaman padi yang dibudidayakan di daerah ini umumnya adalah padi ladang, sedangkan padi sawah hanya dikembangkan di kecamatan Melongguane, Rainis, Tabukan Selatan dan Manganitu. Padi ladang dikembangkan hampir di semua kecamatan, kecuali kecamatan Nanusa yang merupakan pulau-pulau kecil.

Usaha pertanian padi, baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Sangihe-Talaud pada tahun 1980-an cukup baik. Ini terlihat dari peningkatan luas panen dan juga hasil produksinya. Pada tahun 1982 luas panen mencapai sekitar 1222 ha dan meningkat menjadi 1600 ha pada tahun 1986, kemudian mengalami penurunan hingga hanya menjadi 398 ha pada tahun 1990 (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe-Talaud, 1996: 174). Mulai tahun 1990 kembali terjadi kenaikan luas panen, meskipun tidak begitu besar. Kenaikan luas panen ini ternyata kurang diikuti oleh kenaikan produksi yang berarti. Ini menunjukkan bahwa intensifikasi tanaman padi belum diusahakan dengan baik (Tabel 6).

Produksi tanaman pangan lainnya adalah jagung dan kacang-kacangan. Luas areal tanaman jagung, kacang tanah dan kedelai menunjukkan kenaikan yang diikuti oleh kenaikan produksinya. Kacang tanah diusahakan oleh penduduk di semua kecamatan, sedangkan kacang kedelai hanya dikembangkan di tiga kecamatan yaitu Rainis, Beo dan Essang. Menurut Dinas Pertanian setempat beberapa kecamatan di pulau Karakelang cocok untuk budidaya tanaman kedelai.

Kabupaten Sangihe-Talaud merupakan kepulauan yang terdiri dari sekitar 124 pulau dengan luas lautnya sekitar 44.000 km² atau sekitar 95 persen dari luas wilayah. Dengan wilayah laut yang sangat luas tersebut kabupaten ini mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Namun demikian potensi yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ini terlihat dari kontribusi sub-sektor ini terhadap PDRB yang masih relatif kecil, yaitu sekitar 3,9 persen pada tahun 1990 dan naik menjadi sekitar 5,99 persen pada tahun 1995 (lihat Tabel 3A dan 3B).

Produksi ikan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikan produksi ini tidak selalu diikuti oleh kenaikan nilai produksi. Pada tahun 1992 dan 1994 nilai produksi turun menjadi masing-masing 3 646 624 ribu rupiah dan 4 316 312 ribu rupiah. Adanya penurunan nilai produksi ini kemungkinan berkaitan dengan kualitas jenis-jenis ikan yang ditangkap. Peningkatan produksi ikan kemungkinan hanya terjadi pada jenis-jenis ikan yang mempunyai nilai jual rendah (Tabel 7).

Rendahnya tingkat produksi ikan di daerah ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengusaha perikanan dan para nelayan tradisional. Dari sekitar 12 ribu rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan sebagian besar (sekitar 10. 600 rumah tangga) hanya menggunakan perahu tanpa motor, sedangkan yang menggunakan kapal motor tempel dan kapal motor masing-masing sekitar 650 rumah tangga dan 580 rumah tangga. Selama periode 1990-1996 pemilikan motor tempel tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pada tahun 1990 rumah tangga yang memiliki motor tempel sekitar 596 menjadi sekitar 650 pada tahun 1996. Sebaliknya, kepemilikan kapal motor (termasuk pam-boat) meningkat cukup tajam pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Pada tahun 1993 jumlah kapal motor tidak lebih dari 100

rumah tangga, pada tahun 1996 naik menjadi sekitar 580 rumah tangga (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe-Talaud, 1996: 210).

Karena keterbatasan sarana, prasarana dan teknologi penangkapan ini menyebabkan kawasan perairan di daerah ini potensial untuk dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan asing dengan menggunakan armada besar dengan teknologi yang canggih. Nelayan-nelayan asing yang sering memanfaatkan perairan kabupaten Sangihe-Talaud untuk mencari ikan adalah dari Filipina dan Hongkong. Selain merugikan negara secara ekonomi adanya pencurian ikan ini juga potensial mengganggu keamanan dan menimbulkan konflik dengan nelayan setempat.

Tabel 7: Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Ikan di Kabupaten Sangihe Talaud; Tahun 1990-1996

| Tahun | Produksi (ton) | Nilai Produksi (000Rp) |
|-------|----------------|------------------------|
| 1990 | 11 778,6 | 5 431 502 |
| 1991 | 11 704,3 | 5 273 368 |
| 1992 | 12 833,6 | 3 646 624 |
| 1993 | 13 122,8 | 6 09 814 |
| 1994 | 13 222,6 | 6 536 255 |
| 1995 | 14 543,0 | 4 316 312 |
| 1996 | 15 306,6 | 6 906 200 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996. Tabel 5.5.5 Hal. 220-221.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Di Kabupaten Sangihe-Talaud perdagangan dikelompokkan ke dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Pada perdagangan dalam negeri komoditi utama yang diantarpulaukan adalah hasil perkebunan seperti kopra, pala, cengkeh dan fulli. Kopra merupakan komoditi unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (Bappeda TK II Kabupaten Sangihe-Talaud, 1994: 70-71). Akan tetapi, produksi kelapa sebagai bahan baku kopra sangat berfluktuasi. Seperti telah diulas pada bagian terdahulu bahwa produksi kelapa sangat tergantung pada keadaan harga. Kalau harga kelapa naik petani cenderung berusaha menaikkan produksinya. Ini mengakibatkan volume perdagangan kopra juga berfluktuasi. Seperti

terlihat pada Tabel 9, pada tahun 1990 perdagangan kopra sekitar 9 734 ton meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 1991 dan kemudian menurun drastis pada tahun 1992 menjadi hanya 5 518 ton. Pada tahun 1993 meningkat lagi menjadi sekitar 13. 800 ton dan kemudian pada tahun 1994 dan 1995 menurun hingga separohnya. Berbeda dengan kelapa, realisasi perdagangan pala menunjukkan kecenderungan meningkat, walaupun pada tahun 1993 terjadi penurunan hingga hanya sekitar 809 ton. Ini dikarenakan harga pala relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Volume cengkeh yang diantarpulaukan juga sangat berfluktuasi. Ini disebabkan harga cengkeh yang turun drastis mulai tahun 1992.

Selain hasil perkebunan, komoditi dari sektor pertanian lain yang juga diantarpulaukan adalah hasil laut seperti sirip ikan hiu dan biolola. Volume perdagangan kedua hasil laut ini masih relatif kecil. Namun demikian berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pada tahun 1990 volume perdagangan hanya sekitar 1,9 ton meningkat terus hingga mencapai 6,5 ton pada tahun 1995 (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talud, 1996: 285-286). Hasil laut lainnya seperti ikan tuna, cakalang, selar dan tongkol masih belum diantarpulaukan karena hanya cukup untuk memenuhi konsumsi penduduk lokal.

Hasil-hasil komoditi unggulan seperti kopra, pala, cengkeh dan fulli yang dimiliki oleh Kabupaten Sangihe-Talud belum ada yang diperdagangkan langsung ke luar negeri. Semua komoditi tersebut dikirim terlebih dahulu ke Manado, Ujung Pandang dan Surabaya. Untuk meningkatkan ekonomi daerah perlu didukung adanya tataniaga dan iklim yang mendukung para pengusaha memajukan perdagangan di Kabupaten Sangihe-Talud agar potensi daerah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk, terutama masyarakat lokal.

Tabel 8: Realisasi Antar Pulau Beberapa Komoditi Perkebunan di Kabupaten Sangihe-Talaud, 1990-1996 (ton)

| Tahun | Komoditi Perkebunan | | | |
|-------|---------------------|----------|--------|----------|
| | Kopra | Pala | Fulli | Cengkeh |
| 1990 | 9 734,38 | 681,37 | 110,32 | 502,50 |
| 1991 | 17 060,90 | 1 157,60 | 261,24 | 1 759,05 |
| 1992 | 5 518,61 | 1 028,16 | 130,38 | 2 031,64 |
| 1993 | 13 808,59 | 809,65 | 113,71 | 960,39 |
| 1994 | 7 199,06 | 1 583,96 | 120,69 | 1 132,65 |
| 1995 | 6 122,56 | 1 590,06 | 130,61 | 1 401,01 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996. Tabel 7.1.6. Hal. 288.

Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan yang berkembang dengan baik di Kabupaten Sangihe-Talaud adalah perhubungan laut karena daerah ini sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil. Pra sarana dan sarana perhubungan laut yang sudah ada diantaranya adalah tujuh pelabuhan laut yaitu; Tagulandang, Ulu-Siau, Pehe, Tamako, Tahuna, Petta, Lirung dan Beo. Dari tujuh pelabuhan tersebut yang telah mempunyai terminal dan dermaga adalah Tahuna yang merupakan pelabuhan terbesar, Ulu-Siau dan Lirung. Selain itu tujuh pelabuhan tersebut terdapat beberapa pelabuhan yang sudah mempunyai dermaga dan dapat disinggahi kapal perintis (Mangaran, Marore, Melongguane dan Karatung).

Pelabuhan-pelabuhan tersebut selain dimanfaatkan oleh kapal angkutan penumpang juga kapal angkutan barang. Jenis-jenis pelayaran yang melayani angkutan penumpang dan barang adalah armada pelayaran dalam negeri, perintis dan pelayaran rakyat. Pelayaran dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Sangihe-Talaud umumnya dilayani oleh kapal motor besar yang melayani angkutan penumpang dan barang dari Manado dan Bitung ke Tahuna, Lirung, Tagulandang, Beo dan sebaliknya. Dari ke empat pelabuhan tersebut ke pulau-pulau kecil lainnya di Kabupaten Sangihe-Talaud dilayani oleh kapal motor yang lebih kecil dan pelayaran rakyat. Selain itu, telah pula di buka jalur pelayaran penumpang Bitung-Davao melalui Tahuna dan singgah di Lirung sebagai

check point terakhir. Pembukaan jalur ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kontribusi sektor angkutan terhadap PDRB. Jumlah kunjungan kapal, penumpang dan barang dari beberapa pelabuhan ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Tabel 9 berikut ini menunjukkan perkembangan kunjungan kapal, penumpang dan barang selama periode 1990-1995. Umumnya barang yang dibongkar adalah keperluan kebutuhan sembilan bahan pokok seperti beras, gula pasir, terigu, garam, minyak goreng, minyak tanah dan semen. Sedangkan barang yang dimuat umumnya adalah hasil komoditi utama masyarakat setempat yaitu hasil perkebunan (kopra, pala, fulli dan cengkeh). Kalau dilihat secara kuantitas ternyata jumlah barang yang dibongkar jauh lebih besar daripada barang yang dimuat. Ini menunjukkan bahwa lalu-lintas perdagangan dan angkutan dari dan ke Kabupaten Sangihe-Talaud lebih didominasi oleh barang yang masuk, yang berarti bahwa sebagian besar pendapatan daerah mengalir ke luar daerah.

Tabel 9: Jumlah Kunjungan Kapal, Penumpang dan Barang di Pelabuhan-Pelabuhan yang Ada di Kabupaten Sangihe-Talaud, Tahun 1990-1995.

| Tahun | Kapal | Penumpang | | Barang (ton) | |
|-------|-------|-----------|---------|--------------|--------|
| | | Turun | Naik | Bongkar | Muat |
| 1990 | 2 793 | 99 871 | 96 223 | 53 122 | 21 520 |
| 1991 | 2 878 | 105 241 | 90 989 | 57 476 | 39 765 |
| 1992 | 3 190 | 117 000 | 102 764 | 47 685 | 19 861 |
| 1993 | 3 243 | 117 210 | 106 076 | 18 794 | 14 149 |
| 1994 | 3 385 | 131 273 | 116 025 | 74 300 | 36 767 |
| 1995 | 3 482 | 145 467 | 134 817 | 70 552 | 28 140 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996: Tabel 8.3.2. Hal. 322.

Sebagian besar prasarana transportasi darat seperti jalan dan jembatan ada di Pulau Sangir Besar. Di pulau ini panjang jalan propinsi mencapai 169,95 km dengan kondisi 69 persen dalam keadaan baik sisanya dalam kondisi sedang. Pulau Karakelang yang juga merupakan pulau besar hanya mempunyai jalan propinsi dengan panjang 106,78 km yang terdiri dari jalan aspal 90,2 km dan 16,5 km jalan tanah (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud, 1996: 313-314). Jalan propinsi tersebut tidak ada yang berkondisi baik, semuanya dalam kondisi sedang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan prasarana jalan belum merata dan masih sangat timpang dari segi

kualitasnya. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan di pulau Karakelang adalah kesulitan mendatangkan alat-alat berat yang merupakan alat vital dalam pembuatan jalan. Kesulitan ini mengakibatkan kalau ada dana turun untuk membangun jalan di Pulau Karakelang akhirnya dipindahkan ke Pulau Sangir Besar yang mudah dalam pengadaan alat beratnya.

Transportasi udara di daerah ini belum berkembang dengan baik, sehingga kontribusi sub-sektor ini terhadap perekonomian daerah masih rendah. Prasarana yang ada masih sangat terbatas, hanya ada dua pelabuhan udara, yaitu Naha dan Melongguane. Kedua pelabuhan udara tersebut termasuk kelas IV yang hanya dapat didarati oleh pesawat terbang jenis C-212 dan Twin Otter (Pemerintah Kabupaten Sangihe-Talaud, 1994: 47). Maskapai penerbangan yang memanfaatkan pelabuhan udara ini hanya satu (Merpati) yang melayani penerbangan Manado-Naha-Melongguane. Kurang berkembangnya transportasi udara di daerah ini kemungkinan karena tidak adanya penerbangan ke luar selain ke Manado. Tidak adanya penerbangan lanjutan selain ke Manado ini mengakibatkan pula terhambatnya perkembangan sektor pariwisata. Wisatawan asing yang berkunjung ke Manado jarang yang singgah ke Sangihe-Talaud karena tidak adanya penerbangan langsung ke luar negeri, melainkan harus kembali lagi ke Manado.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sumber daya alam nir hayati yang terdapat di Kabupaten Sangihe-Talaud adalah bahan tambang golongan C seperti pasir, kerikil, pasir urug dan tanah urug. Eksploitasi hasil tambang ini umumnya hanya digunakan untuk konsumsi lokal. Sumbangan sub sektor ini masih relatif kecil namun pertumbuhannya relatif baik, meskipun pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan (lihat Tabel 4A dan 4B). Potensi lainnya adalah bahan tambang golongan B yaitu emas yang diperkirakan terdapat di Manganitu Selatan, Tabukan Selatan dan Tamako (di Pulau Sangir besar). Jenis bahan tambang ini belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah karena masih dalam tahap eksplorasi.

Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan pertumbuhannya sangat berfluktuasi, tetapi menunjukkan peningkatan mulai tahun 1993 (Tabel 4a dan 4B). Sektor ini cukup perpeluang untuk dikembangkan mengingat cukup besar jumlah tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Jumlah perusahaan industri pengolahan yang meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka dan industri logam mesin dan kimia menunjukkan peningkatan pada periode 1990-1995. Pada tahun 1990 jumlah perusahaan sekitar 3.067 berkembang menjadi 4.049 pada tahun 1995. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 1990 sebesar 7.078 meningkat menjadi 9.215 pada tahun 1995 (Kantor Statistik Kabupaten Sangihe-Talaud, 1996: 251). Dari sekitar 4.049 perusahaan tersebut sebagian besar (68 persen) merupakan perusahaan yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan. Dilihat dari jenisnya, sebagian besar merupakan perusahaan non-formal atau industri kecil/perumahan (home-industri). Jumlah perusahaan formal yang ada hanya sekitar 2,5 persen dari sekitar 4.049 perusahaan. Industri kecil yang berkembang adalah industri pemotongan hewan, pengolahan, makanan, pengeringan dan pengasapan ikan, industri sandang, kulit dan tenunan.

Dalam rangka menunjang perkembangan industri dengan memanfaatkan potensi daerah adalah pelatihan penyamakan kulit ikan hiu. Departemen perindustrian melalui Dinas Perindustrian Tingkat II Kabupaten Sangihe-Talaud bekerja sama dengan Balai penyamakan kulit Yogyakarta mengadakan pelatihan penyamakan kulit ikan hiu dengan mengirim tenaga kerja untuk belajar ke Yogyakarta. Kerjasama ini juga menyangkut pemasarannya, yaitu Balai Penyamakan Kulit Yogyakarta bersedia memasarkan hasil kulit olahan dari Sangihe-Talaud.

3.2. Pembangunan Sosial

Masyarakat Sangir Talaud adalah masyarakat yang dalam pola tingkah lakunya didasarkan pada budaya petani khususnya tanaman keras dan nelayan. Dalam hal ini kebudayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari proses belajar dan beradaptasi dengan

lingkungan dimana mereka tinggal. Ini berpengaruh pula pada orientasi nilai-nilai, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki.

Upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang menyangkut aktivitas sosial budaya telah dilakukan. Tentunya dalam hal ini terdapat pula gesekan antara nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat selama ini dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui upaya pembangunan yang pada dasarnya juga merupakan upaya pembaharuan. Namun demikian, tidak semua upaya pembangunan sosial budaya yang dilakukan pemerintah selama ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini dapat dimengerti, karena untuk merubah nilai-nilai dan perilaku masyarakat dalam menerima sesuatu yang baru diperlukan proses yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Upaya pembangunan yang berkaitan dengan nilai-nilai gotong royong merupakan salah satu contoh keberhasilan pembangunan. Adanya sifat gotong royong tersebut telah dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat seperti misalnya pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana dan prasarana jalan di desa dan perumahan. Adanya keberhasilan program pembangunan dari pemerintah seperti halnya program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tidak terlepas dari nilai gotong royong dan persatuan dalam kelompok. Fungsi kebersamaan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai gotong royong yang dimiliki diwujudkan dalam kerjasama kelompok IDT. Di beberapa desa seperti di Bukide dan Tinakareng sudah terlihat bahwa program ini dapat bergulir dengan baik. Masyarakat sudah membentuk kelompok-kelompok untuk memanfaatkan bantuan IDT secara bergantian. Kegiatan kelompok IDT disesuaikan dengan kegiatan masyarakat dalam hal ini adalah penangkapan ikan hiu. Keberhasilan program IDT ini tentunya cukup memberikan arti yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya program pemerintah lainnya nampaknya mengalami hambatan berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya dalam pola berpikir dan pengetahuan masyarakat dalam aktivitas pertanian. Sebagai contoh, upaya program pembangunan pertanian oleh pemerintah selama ini masih belum menunjukkan

keberhasilan. Pemerintah telah mendorong petani untuk mengolah tanahnya dengan usaha tanaman pangan dengan intensifikasi. Pada awalnya program ini cukup berhasil karena adanya bimbingan dan pendampingan dari tenaga pertanian. Namun demikian, karena merupakan program, setelah pembinaan selesai maka kesinambungannya tidak terjamin. Oleh sebab itu, perlu pula kesinambungan pembinaan baik bagi petani sendiri maupun petugas pertanian. Kegiatan pertanian khususnya tanaman pangan memerlukan usaha yang ulet dan tekun serta intensitas pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di kebun tanaman keras. Pola berpikir dan pola perilaku petani tanaman keras pada umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan petani tanaman pangan. Oleh karena itu perlakuan dan bentuk program yang ditujukan kepada petani tanaman keras harus berbeda dengan petani tanaman pangan karena etos kerja mereka juga berbeda.

Adanya pengenalan program pembangunan tanaman pangan ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan penghasilan dan upaya untuk memanfaatkan lahan yang terbatas dan ini berkaitan pula dengan masa depan mereka. Selama ini dengan usaha perkebunan rakyat masih dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, di masa yang akan datang belum menjadi bahan pemikiran, karena orientasi nilai budaya mereka tentang waktu masih berorientasi pada masa lalu dan masa kini saja. Dengan sistem pertanian dan perkebunan yang selama ini mereka lakukan lahan akan habis karena lebih mementingkan ekstensifikasi pertanian bukan intensifikasi pertanian. Oleh karena itu dalam memperkenalkan inovasi pertanian dengan membiasakan masyarakat petani kebun agar mengusahakan tanahnya secara lebih intensif berarti harus merubah orientasi dan pola berpikir mereka.

Kesiapan untuk menerima perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi pertanian terutama dalam penguasaan teknologi dan pengetahuan-pengetahuan baru sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Oleh karena itu dalam pengenalan inovasi tersebut harus disertai dengan pembangunan sosial budaya yang terarah khususnya yang berhubungan dengan keberhasilan dari perubahan atau inovasi tersebut. Pembangunan ini lebih ditujukan pada upaya pengembangan pengetahuan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan dapat menerima perubahan-perubahan. Upaya ini harus disertai dengan pendekatan-pendekatan, bimbingan-bimbingan dan

advokasi yang berkesinambungan sampai mereka bisa dianggap mandiri dalam menerima pembaharuan.

Selain upaya pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata sudah dilakukan oleh pemerintah mengingat potensi pariwisata di wilayah ini cukup baik. Industri pariwisata merupakan usaha yang baru bagi masyarakat Sangihe Talaud. Kesiapan masyarakat untuk menerima pariwisata dalam salah satu aktivitas kehidupan mereka masih memerlukan bimbingan. Tenaga-tenaga yang bergerak dalam industri pariwisata harus benar-benar disiapkan untuk menerima kunjungan para wisatawan. Selain itu, potensi yang ada dalam masyarakat seperti kesenian, kerajinan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat harus dikembangkan untuk menunjang keberhasilan pariwisata.

Selama ini walaupun pemerintah sudah mengupayakan pengembangan pariwisata namun nampaknya pembinaan kebudayaan daerah khususnya kesenian tradisional dirasakan masih kurang. Demikian pula dalam pengembangan kerajinan juga masih banyak memerlukan bimbingan dari pemerintah. Kerajinan kayu hitam yang sudah dikenal sejak lama nampaknya masih kurang bervariasi dan kualitasnya masih kurang bagus bila dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Bali yang juga dikenal dengan kerajinan kayu hitam. Oleh sebab itu upaya pembangunan, khususnya dalam pembangunan pariwisata ini masih memerlukan banyak pembinaan dan pembenahan di beberapa aspek guna menunjang keberhasilan pariwisata.

3.3. Pembangunan Hankam

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang dianggap rawan dan dapat merupakan sumber konflik dengan negara tetangga maupun dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pertahanan keamanan yang dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan melindungi kedaulatan negara. Pembangunan pertahanan keamanan sangat diperlukan di wilayah ini mengingat kondisi wilayah perbatasan yang rawan. Disamping itu, pembangunan pertahanan diperlukan pula untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan negara tetangga.

Perairan yang ada di wilayah Sulawesi Utara khususnya di Kepulauan Sangihe Talaud penting bagi pertahanan keamanan karena merupakan pintu gerbang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, wilayah perairan ini juga kaya akan sumber daya hayati laut. Oleh sebab itu di wilayah ini rawan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh kapal-kapal asing terutama nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan, perompakan dan penyelundupan.

Dalam rangka pembangunan pertahanan keamanan di wilayah perairan Sangihe Talaud, upaya untuk penegakan kedaulatan dan hukum di laut di wilayah Sulawesi Utara umumnya dan di wilayah Sangihe Talaud khususnya telah dilakukan pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan oleh Daerah Angkatan Laut setempat. Upaya lainnya adalah berperan aktif dalam pelaksanaan Perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement) antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Perjanjian ini tentunya memberikan landasan bagi kerjasama dan saling pengertian tentang pentingnya keamanan di antara kedua negara.

Untuk meningkatkan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan upaya pembangunan lainnya adalah dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang berupa Kantor BCA, pos-pos keamanan laut, Imigrasi, Bea Cukai, Pos Polisi seperti yang terdapat di Marore dan Miangas. Semuanya ini dilakukan untuk mengawasi keamanan dan lalu lintas manusia maupun barang yang akan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian prasarana penunjangnya masih belum memadai, sebagai contoh dalam pengadaan kapal patroli laut, masih sangat terbatas. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi perairan yang cukup luas, sehingga untuk mencegah terjadinya pencurian ataupun penyelundupan oleh kapal-kapal asing masih belum maksimal. Selain keterbatasan kapal patroli, personel yang terlibat dalam hal ini juga masih sangat terbatas. Demikian pula upaya patroli laut yang dilakukan oleh kapal-kapal Angkatan Laut secara berkala juga masih dirasakan kurang memadai untuk mencegah terjadinya kerawanan-kerawanan di perairan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu masih diperlukan upaya peningkatan pertahanan keamanan khususnya di wilayah perairan Sangihe Talaud.

Upaya pembangunan pertahanan keamanan lainnya yang sudah berjalan selama ini adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut bersama mewujudkan ketertiban dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut, pemerintah telah membentuk satuan Hansip dan Wanra yang unsurnya adalah masyarakat yang dibekali dengan berbagai ketrampilan bela negara.

Selain pembangunan keamanan dari pemerintah sebenarnya keamanan dan ketertiban sudah diciptakan oleh masyarakat setempat. Rasa nasionalisme dan kedaerahan yang dijunjung tinggi merupakan modal bagi terciptanya ketertiban dan keamanan di wilayah ini. Demikian pula rasa solidaritas atau toleransi beragama yang baik di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda di daerah ini juga menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan.

BAB IV

KONSEP DAN ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH: TINJAUAN SOSIAL-DEMOGRAFI

Dalam bab ini akan disajikan berbagai alternatif pendekatan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan pemerintah Daerah Sangihe-Talaud pada khususnya dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai aspek dipertimbangkan dalam penyusunan alternatif pendekatan. Selain aspek kesejahteraan, hankam dan kerjasama dengan negara tetangga juga akan dilihat aspek kependudukannya yaitu baik dari sisi kualitasnya maupun mobilitasnya. Mobilitas penduduk penting untuk dikaji dalam pengembangan alternatif pendekatan strategi pembangunan karena dari studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mobilitas sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi serta keadaan sosial politik di kedua negara.

Bab ini terdiri dari dua bagian. Pertama, uraian mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut pemanfaatan potensi dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sangihe-Talaud. Berdasarkan permasalahan yang ada kemudian disusun berbagai alternatif pendekatan pembangunan yang akan disajikan pada bagian ke dua dari bab ini.

4.1. Permasalahan/isu-isu.

Kabupaten Sangihe Talaud terdiri dari lebih dari 124 pulau dan yang tergolong besar hanya dua pulau, yaitu Pulau Sangir Besar dan Pulau Karakelang. Pulau-pulau kecil yang ada umumnya mempunyai daya dukung lingkungan alam (hayati dan nirhayati)

yang sangat terbatas. Kondisi topografi pada pulau-pulau kecil tersebut hampir 75 persen mempunyai kemiringan di atas 15 derajat, bahkan yang mempunyai kemiringan di atas 40 derajat mencapai 40 persen. Hal ini menyebabkan daerah tersebut rawan banjir dan longsor. Dengan keadaan tersebut daerah ini kurang cocok untuk pemukiman maupun usaha tanaman pangan karena keterbatasan persediaan sumber air tanah.

Wilayah ini pada bulan September sampai Februari mengalami musim hujan yang dibarengi dengan datangnya angin dari barat. Pada musim ini gelombang laut umumnya besar. Letak pulau-pulau kecil yang sangat menyebar dan dibatasi dengan lautan luas yang terkenal ganas ombaknya pada musim-musim tertentu menyebabkan transportasi antar pulau semakin sulit. Transportasi laut memegang peran utama dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk menjalankan derap pembangunan. Karena daya dukung pulau-pulau tersebut sangat terbatas, maka berbagai kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari harus didatangkan dari luar. Sebaliknya, masyarakat juga harus memanfaatkan transportasi laut untuk menjual hasil bumi yang umumnya berupa hasil perkebunan. Permasalahan lain yang muncul sehubungan dengan letak pulau-pulau yang terpencar-pencar dan dibatasi oleh lautan luas dengan sarana dan prasarana transportasi yang sangat terbatas adalah adanya ancaman keamanan yang datang dari luar, mengingat wilayah ini merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Filipina. Ancaman dari luar tersebut dapat berupa ancaman keamanan wilayah dengan masuknya pengaruh-pengaruh asing dan ancaman terhadap pencurian kekayaan laut. Pencurian kekayaan laut sudah sering terjadi di wilayah ini. Selain merugikan kekayaan negara pencurian ini juga berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk setempat. Idealnya wilayah perbatasan mendapatkan perhatian utama dalam pengawasan keamanan laut, akan tetapi jumlah armada dan aparat yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi mengakibatkan daerah ini masih sering terjadi gangguan keamanan.

Persebaran penduduk di wilayah ini kurang merata. Di dua pulau besar (Sangir Besar dan Karakelang) umumnya kepadatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di pulau-pulau kecil. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan keadaan pulau-pulau kecil yang terbatas daya dukung alamnya untuk menopang kehidupan sehari-hari, di samping letaknya yang menyebar dibatasi lautan luas dengan transportasi yang masih

minim. Kondisi ini diduga yang menyebabkan adanya indikasi migrasi penduduk ke luar, baik migrasi internal ke pulau besar atau migrasi ke luar Sangihe-Talaud. Terdapatnya pulau-pulau kecil yang penduduknya jarang dan masih banyaknya pulau-pulau kosong yang belum dihuni juga berpotensi menimbulkan ancaman keamanan dari luar. Adanya penduduk yang menghuni pulau secara tidak langsung merupakan pertahanan pertama, mengingat terbatasnya aparat keamanan yang bisa mengamankan wilayah perairan dan daratan di wilayah perbatasan.

Secara umum potensi perkebunan dengan hasilnya berupa tanaman keras, masih belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini peningkatan produksi masih terlalu mengandalkan usaha ekstensifikasi, usaha intensifikasi belum terlaksana dengan baik. Padahal lahan untuk perkebunan sudah mulai berkurang, penduduk mulai merambah hutan yang mempunyai kemiringan tinggi. Kalau hal ini diteruskan dikhawatirkan akan merusak lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada bahaya erosi dan banjir. Permasalahan menyangkut belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian antara lain adalah rendahnya sumber daya manusia, kurangnya penggunaan teknologi dan faktor lainnya seperti keterbatasan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan). Rendahnya sumber daya manusia bisa terlihat dari pendidikan penduduk yang rendah dan kurangnya penggunaan teknologi dalam mengolah lahan pertanian. Kurangnya penggunaan teknologi ini dapat dilihat dari cara pengolahan tanah yang jarang memakai hewan sebagai alat bantu, di samping itu dalam menyiangi rumput juga masih sederhana dengan memakai tangan, tidak menggunakan alat seperti sabit. Selain itu, dalam mengolah lahan pertanian tanaman pangan petani daerah ini masih sangat tergantung pada peranan penyuluh pertanian (PPL). Sementara itu, tenaga PPL di wilayah ini masih sangat terbatas.

Produksi tanaman pangan, khususnya padi telah menunjukkan penurunan drastis sejak tahun 1980-an karena menurunnya luas panen. Berbagai usaha untuk meningkatkan produksi padi diantaranya adalah usaha pencetakan sawah di Kecamatan Beo yang diusahakan melalui program pemukiman kembali migran dari Filipina. Usaha ini banyak menemui kegagalan yang dikarenakan antara lain oleh rendahnya sumber daya manusia. Produksi tanaman pangan yang ada belum mencukupi kebutuhan penduduk sehingga

masih mendatangkan dari luar. Pemerintah daerah setiap tahun terus mendatangkan beras, gandum, gula, bahkan ikan asin dari Manado. Di samping itu kebutuhan penduduk lainnya seperti minyak tanah, sabun, seng, semen dan berbagai peralatan rumah tangga masih didatangkan dari Manado. Dengan demikian sebagian pendapatan penduduk Sangihe-Talaud mengalir ke luar daerah.

Wilayah Kabupaten Sangihe-Talaud menyimpan kekayaan laut yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi dari sub-sektor perikanan dari kualitas dan kuantitas masih sangat rendah. Rendahnya produksi perikanan ini terutama dikarenakan masih terbatasnya sarana dan teknologi penangkapan yang dikuasai serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun telah ada peningkatan jumlah armada penangkapan ikan dengan menggunakan perahu motor (motor tempel), namun jumlahnya sangat tidak memadai dengan luasnya daerah tangkapan yang bisa dimanfaatkan. Kekayaan laut yang melimpah di wilayah ini telah mengundang nelayan non-tradisional yang datang dari luar baik secara legal maupun ilegal. Pencurian ikan sering terjadi dengan menggunakan armada besar dan pada umumnya dilengkapi dengan senjata. Selain itu, di daerah yang termasuk wilayah BCA sering didatangi pedagang dari Filipina Selatan. Para pedagang tersebut umumnya datang ke wilayah ini membawa minuman (sejenis coca-cola), minuman keras dan barang pecah belah. Masuknya minuman keras secara ilegal dan terjadinya pencurian ikan telah menjadi sumber kerawanan daerah perbatasan.

Masalah mendasar dalam pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah lemahnya kualitas penduduk Sangihe-Talaud. Ini terlihat dari rendahnya pendidikan penduduk. Pada tahun 1995 jumlah penduduk yang tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 38 persen atau satu dari tiga penduduk Sangihe Talaud tidak sekolah dan tidak tamat SD. Dibandingkan dengan tingkat pendidikan di kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Utara tingkat pendidikan penduduk Sangihe-Talaud ini sangat rendah. Perbedaan tingkat pendidikan antara daerah kota dan desa terlihat makin melebar dengan naiknya tingkat pendidikan. Perbedaan ini mempunyai dua implikasi. Pertama, merupakan indikasi kurangnya fasilitas pendidikan lanjutan di desa. Kedua, penduduk yang telah mempunyai pendidikan cukup pindah ke kota atau bermigrasi ke daerah lain

sehingga yang tinggal hanyalah mereka yang berpendidikan rendah. Terdapat indikasi bahwa penduduk Sangihe-Talaud yang bermigrasi ke luar lebih banyak dari pada yang masuk. Padahal penduduk yang berpendidikan diharapkan sumbangannya untuk membangun wilayah ini.

4.2. Alternatif Pemecahan

Melihat potensi dan kondisi wilayah perbatasan di Sangihe Talaud dikaitkan dengan upaya pembangunan wilayah ini yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan berbagai upaya langkah dan kebijakan. Mempertimbangkan ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah perbatasan Sangihe Talaud serta kerawanan yang ada karena merupakan wilayah perbatasan maka pemecahan permasalahan pembangunan ini dapat dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan demikian tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasan perbatasan Sangihe Talaud adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui upaya pemenuhan kebutuhan pokok, sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta penciptaan keamanan masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, mencegah masuknya ideologi dan pengaruh-pengaruh luar serta menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

Menyadari kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Sangihe Talaud yang relatif masih terbelakang, baik aspek sumber daya manusia, penguasaan teknologi, sosial budaya, serta melihat strategisnya wilayah perbatasan ini diperlukan adanya upaya pembangunan secara terpadu. Pembangunan secara terpadu ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan aparat dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, agar terwujud kesejahteraan yang merata. Diperlukan pula keterpaduan antar sektor terkait dalam mewujudkan pembangunan oleh sebab itu koordinasi merupakan kunci sukses pembangunan ini.

Keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan sangat diperlukan mengingat bahwa banyaknya program pembangunan tersebut tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan di kawasan perbatasan perlu melibatkan

seluruh instansi terkait dan berbagai sumber dana, investasi modal ataupun kekuatan ekonomi lainnya untuk mengelola sumber daya alam yang cukup potensial.

Dari analisa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sangihe-Talaud di bidang sumber daya alam, sosial-budaya dan sumber daya manusia serta pemanfaatannya untuk pembangunan dapat diketahui adanya dua permasalahan utama yang satu sama lain berkaitan. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan yang kedua adalah rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari rendahnya pendidikan penduduk dan penguasaan teknologi.

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB relatif besar, tetapi pada tahun-tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Sub sektor pertanian yang masih bisa dikembangkan adalah perkebunan dan perikanan. Daerah ini merupakan penghasil komoditi perkebunan kelapa, pala, cengkeh dan kakao yang handal. Iklim dan kondisi geografisnya sangat mendukung usaha perkebunan di daerah ini. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang mendukungnya masih relatif rendah. Penduduk daerah ini sudah terbiasa mengolah lahan pertanian tanaman keras sehingga tidak perlu mengenalkan cara bertani tanaman keras. Hal yang perlu ditingkatkan adalah penguasaan teknologinya. Selama ini untuk meningkatkan produksi masih sangat tergantung usaha ekstensifikasi. Sementara itu, lahan yang ada di wilayah ini sudah mulai terbatas, kalau usaha ekstensifikasi tetap dijalankan dikhawatirkan akan mengancam kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha dan iklim yang mendorong meningkatnya produksi perkebunan melalui usaha intensifikasi. Sektor pertanian lainnya yang potensinya masih belum termanfaatkan secara optimal adalah perikanan. Daerah Kabupaten Sangihe-Talaud merupakan pulau-pulau dengan wilayah laut luas yang menyimpan kekayaan laut melimpah. Karena rendahnya penguasaan teknologi dan berbagai faktor terkait seperti rendahnya modal, dukungan prasarana dan sarana maka kekayaan laut ini belum termanfaatkan bagi kesejahteraan penduduknya. Mengingat kekayaan sumber daya alam sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus mengindahkan kaidah-kaidah yang ada sehingga kelestariannya

bisa terjamin. Untuk itu diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang mendukungnya dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana serta dukungan kebijaksanaan pemerintah.

Peningkatan usaha perkebunan dan perikanan di wilayah ini menjadi sangat penting pada saat ini, mengingat Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hasil perkebunan dan perikanan dewasa ini merupakan primadona penghasil devisa negara. Untuk itu berbagai permasalahan menyangkut pemanfaatan potensi ini di Kabupaten Sangihe-Talaud harus diupayakan untuk ditanggulangi, supaya potensi sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan secara lestari dan memberikan kesejahteraan penduduknya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan potensi daerah merupakan usaha yang perlu segera dilakukan. Berbagai faktor terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia perlu dipilah-pilah sesuai dengan akar permasalahannya. Dalam hal ini berbagai faktor tersebut bisa dikelompokkan dalam sebab langsung, tidak langsung dan sebab mendasar. Sebab langsung ditangani melalui usaha jangka pendek dengan memberikan/meningkatkan akses terhadap pendidikan dan latihan pada penduduk. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan pendidikan penduduk adalah bahwa yang dibutuhkan oleh penduduk Sangihe-Talaud bukan hanya peningkatan pendidikan formal saja melainkan juga penguasaan teknologi yang cocok untuk usaha pertanian dan perikanan. Ini penting mengingat penduduk merupakan faktor penting untuk melaksanakan pembangunan. Kalau peningkatan pendidikan hanya difokuskan pada pendidikan formal dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru. Penduduk berpendidikan akan bermigrasi ke luar karena umumnya penduduk yang terdidik cenderung kurang berminat untuk berusaha dalam bidang pertanian, padahal peluang dan potensi yang ada di daerah ini adalah pertanian.

Sebab tidak langsung berkaitan dengan masalah rendahnya sumber daya manusia adalah kemiskinan penduduk dan diatasi dengan perencanaan jangka menengah. Untuk itu perlu adanya peningkatan pendapatan penduduk melalui pemanfaatan potensi yang ada. Peningkatan pendapatan penduduk ini selain memberikan/meningkatkan alternatif

lapangan usaha juga harus dipikirkan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pemasaran, kontrol harga (tata niaga) dan dukungan kebijaksanaan pemerintah setempat. Sebab mendasar terletak pada tingkat masyarakat lokal dan nasional yaitu letak wilayah ini yang terisolir dan secara geografis terpencar-pencar, iklim laut yang tidak bersahabat dan sarana transportasi yang sangat terbatas. Untuk itu diperlukan dukungan kebijaksanaan untuk membuka keterisoliran daerah ini dengan lebih meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Rincian permasalahan dan alternatif pemecahan dapat dilihat dalam matriks.

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya perkebunan dan perikanan juga harus dilihat dari berbagai faktor terkait yang mempengaruhinya dan dikelompokkan menurut jenjang permasalahan yang ada, agar penanganannya mencapai sasaran. Ini dikarenakan setiap faktor penyebab tidak bisa diatasi dengan kebijaksanaan dan jangka waktu yang sama. Faktor yang merupakan sebab langsung dari rendahnya pemanfaatan potensi perkebunan dan perikanan diantaranya adalah rendahnya penguasaan teknologi, kurangnya modal dan ketersediaan sarana produksi yang memadai. Permasalahan ini bisa diatasi dengan memberikan akses pada penduduk terhadap teknologi melalui pelatihan dan pendampingan, penyaluran modal usaha dan kemudahan mendapatkan sarana produksi. Sebab tidak langsung diantaranya adalah skala usaha yang masih kecil, sistem pemasaran yang kurang mendukung dan kurangnya jaminan terhadap stabilitas harga. Untuk itu diperlukan usaha penyadaran pada masyarakat untuk lebih berorientasi pada peningkatan produksi/usaha. Selama ini penduduk terkesan mengolah lahan pertanian/perikanan hanya sebatas untuk keperluan sendiri, belum ada orientasi untuk perdagangan/bisnis yang lebih luas. Disamping itu, perlu adanya dukungan pemerintah dengan menciptakan sistem berusaha yang memberikan peluang lebih besar dengan cara mengatur dan mengawasi sistem pemasaran, penyediaan fasilitas pasar yang memadai serta sarana dan prasarana lain yang mendukungnya. Rincian lebih lanjut permasalahan menyangkut peningkatan potensi perkebunan dan perikanan dapat dilihat dalam matriks.

Matriks untuk alternatif usaha peningkatan sumber daya manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina di Kabupaten Sangihe Talaud.

| Level Masalah | Isu Pokok | Strategi | Jangka waktu | Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|--|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Sebab langsung (level individu/keluarga) | <ul style="list-style-type: none"> Biaya pendidikan lanjutan (SLTP/SLTA) cukup tinggi. SLTP/SLTA tidak terdapat di pulau kecil, sehingga harus kost di pulau besar. Ini meningkatkan biaya sekolah | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses untuk mendapatkan pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek (3 tahun) | <ul style="list-style-type: none"> Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi Gerakan orang tua asuh lebih diintensifikan dan diprioritaskan untuk daerah terpencil Program asrama (terutama pada sekolah negeri) untuk penduduk pulau terpencil. Biaya asrama rendah, makan ditanggung oleh siswa sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> Penduduk usia sekolah yang tinggal jauh dari fasilitas sekolah lanjutan (terutama yang tinggal di pulau terpencil). |
| <ul style="list-style-type: none"> Sebab tidak langsung (level masyarakat, komunitas) | <ul style="list-style-type: none"> Kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan keluarga/komunitas untuk berusaha | <ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek-menengah | <ul style="list-style-type: none"> Program diversifikasi usaha melalui peremajaan tanaman perkebunan. Program pemasyarakatan tanaman tumpang sari Peningkatan ketrampilan untuk wira usaha seperti industri rumah tangga di bidang kerajinan dari limbah pohon kelapa, bambu, pembuatan abon ikan, pembuatan emping Program-program yang sudah ada seperti IDT, Kredit usaha tani, kredit usaha menengah lebih diintensifikan. | <ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin yang berusaha di bidang pertanian Penduduk miskin penduduk miskin |

| Level Masalah | Isu Pokok | Strategi | Jangka waktu | Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|--|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sebab tidak langsung (level masyarakat/komunitas) | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan yang belum mencukupi terutama untuk SLTP dan SLTA sehingga tidak terjangkau oleh penduduk | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses untuk mendapatkan pendidikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka menengah | <ul style="list-style-type: none"> • Program SLTP kecil, seperti SD kecil. • SLTP terbuka dengan program khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal. • Perlu dipikirkan untuk membangun sekolah yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya sekolah pelayaran, pertanian | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dimana tidak terdapat SLTP (pulau kecil dan terpencil yang jumlah penduduk miskinnya cukup besar. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sebab tidak langsung (level masyarakat, komunitas) | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih rendah. | <ul style="list-style-type: none"> • Penyadaran | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek-menengah | <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pentingnya pendidikan melalui media elektronik (radio), poster atau melalui kesenian daerah (masamper) | <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk yang mempunyai anak usia sekolah di daerah pedesaan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sebab Mendasar (Tingkat regional dan nasional) | <ul style="list-style-type: none"> • Letak geografis yang berpulau-pulau dan terpencar-pencar (terisolir) dan transportasi yang masih kurang menyulitkan penempatan fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun tenaga pengajar | <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijaksanaan untuk membuka keterisoliran | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka menengah-panjang | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan transportasi dengan memperluas sarana dan prasarana transportasi antar pulau. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemda setempat • Perusahaan pelayaran lokal. |

Matriks untuk usaha peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (laut) di wilayah Kepulauan Sangihe-Talaud

| Level Masalah | Isu Pokok | Strategi | Jangka waktu | Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|--|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Sebab langsung (level individu/keluarga) | <ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan tehnologi penangkapan dan pengelolaan masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> Memberi pelayanan yang lebih luas pada nelayan untuk meningkatkan kemampuan/tehnologi penangkapan yang efektif dan tidak merusak lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kemampuan/tehnologi penangkapan dan pengelolaan yang dilakukan melalui program yang sudah ada (seperti program pembinaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan) | <ul style="list-style-type: none"> Nelayan umumnya Ketua/anggota kelompok masyarakat (Pokmas IDT yang kegiatannya disektor perikanan). |
| | <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan modal | <ul style="list-style-type: none"> Memberi pelayanan yang lebih luas pada nelayan untuk mendapatkan kredit modal usaha | <ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> Pemberian kredit lunak Penerapan sistem bapak angkat dengan bank setempat (BRJ) | <ul style="list-style-type: none"> Kelompok masyarakat yang sudah ada di daerah |

| Level Masalah | Isu Pokok | Strategi | Jangka waktu | Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|---|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sebab tidak lansung (level komunitas) | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem usaha yang masih merupakan usaha perorangan/tradisional belum merupakan usaha komersial • Pekerjaan menangkap ikan/nelayan merupakan pekerjaan sampingan yang hasilnya terutama untuk konsumsi keluarga | <ul style="list-style-type: none"> • Penyadaran di tingkat komunitas untuk meningkatkan orientasi dan wawasan berusaha secara lebih komersial agar SDA dapat dimanfaatkan secara optimal (memunyai nilai tambah) | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> • Program penyadaran yang dapat dilakukan melalui pertemuan rutin kelompok masyarakat yang sudah ada seperti Pokmas IDT, pengarahan dari aparat, desa dan kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat nelayan pada umumnya dan kelompok-kelompok IDT, anggota koperasi, pengusaha lokal |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya tata niaga yang bisa menjamin kestabilan harga | <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijaksanaan pemerintah setempat | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka menengah | <ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan adanya hubungan juragan (toke) dan nelayan yang tidak menguntungkan nelayan | <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok nelayan, masyarakat pengusaha perikanan dan pemerintah setempat |

| Level Masalah | Isu Pokok | Strategi | Jangka waktu | Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|--|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sebab mendasar | <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana pemasaran yang kurang memadai | <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijaksanaan untuk membantu pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka panjang | <ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan/aturan yang secara eksplisit memberi kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil laut • Kebijaksanaan untuk menempatkan kapal penampung hasil laut rakyat (dari Perikani) di lebih banyak tempat di sekitar wilayah Sangihe-Talaud | <ul style="list-style-type: none"> • Investor perikanan asing dan nasional maupun paungan • PT Perikani |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Keterisoliran daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijaksanaan/pe raturan eksplisit untuk membuka keterisoliran | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka panjang | <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas sarana/prasarana transportasi laut dan udara • Membuka jalur pelayaran langsung dari kepulauan Sangihe-Talaud (Tahuna) ke wilayah lain di Indonesia dan di luar negeri (ke luar negeri sudah dirintis oleh Pelni dengan Kapal Tilonkabila ke Davao dengan check point akhir di Lirung). | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan pelayaran dan penerbangan |

BAB V KESIMPULAN

Sektor pertanian yang mempunyai kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sangihe-Talaud adalah sub-sektor perkebunan. Hasil perkebunan yang merupakan komoditi unggulan dari daerah ini adalah kopra, pala, cengkeh dan kakao. Semua hasil perkebunan tersebut merupakan primadona penghasil devisa negara, terlebih pada saat krisis ekonomi seperti saat ini. Perkebunan di wilayah ini masih merupakan perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional. Selama ini untuk meningkatkan produksi masih sangat tergantung pada perluasan areal tanam, padahal lahan untuk perluasan pertanian sudah sangat terbatas. Usaha intensifikasi belum menampakkan hasil yang optimal dan menghadapi banyak kendala, diantaranya terbatasnya sarana produksi dan kurangnya bimbingan dari penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian di daerah ini jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak memadai dengan luas wilayah yang harus dilayani. Di samping itu, kurangnya jaminan tata niaga yang baik, terbatasnya sarana angkutan berpengaruh terhadap harga komoditi perkebunan unggulan seperti kopra, pala dan cengkeh. Jika harganya rendah petani menjadi kurang terangsang untuk meningkatkan produksinya.

Kabupaten Sangihe-Talaud merupakan kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, tetapi potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sumbangan sub-sektor ini terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil. Kurangnya pemanfaatan sub-sektor ini karena kurang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Penduduk yang berusaha di bidang perikanan di wilayah ini umumnya juga masih mengelolanya secara tradisional, belum berorientasi pada pasar yang lebih luas. Ini berkaitan dengan penguasaan teknologi, permodalan dan kemudahan pemasaran yang masih banyak menghadapi kendala. Karena penduduk belum banyak mengusahakan secara maksimal maka potensi kekayaan laut di daerah ini lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan ikan berskala besar baik dari luar daerah maupun dari asing, bahkan tidak jarang terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Sebagai daerah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Filipina, daerah ini juga mempunyai potensi di bidang perdagangan. Hubungan dagang antara penduduk Kabupaten Sangihe-Talaud dengan penduduk Filipina bagian Selatan sudah sejak lama dilakukan. Hubungan dagang ini terjadi karena perbedaan produksi antar daerah serta tuntutan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang dalam keadaan krisis ini kemungkinan terjadi peningkatan jumlah pedagang dari Filipina Selatan yang berbelanja ke Kabupaten Sangihe-Talaud dengan memanfaatkan kurs rupiah yang sangat rendah dibandingkan dollar. Dengan kurs rupiah yang mencapai sekitar Rp 9000, barang-barang dari Indonesia dianggap sangat murah. Selama ini perdagangan resmi ke dan dari Filipina melalui Sangihe-Talaud (daerah perbatasan) hanya boleh dilakukan oleh penduduk lokal (yang termasuk penduduk daerah BCA) sangat dibatasi sekali dalam jumlah dan nilainya ekonomisnya dan harus melalui *check point* kecamatan BCA. Potensi perdagangan selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang Filipina dari pada penduduk setempat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, perlu diberikan semacam dukungan bagi penduduk/pengusaha lokal untuk juga mengambil bagian dalam perdagangan antar negara yang sudah berlangsung sejak lama. Filipina merupakan peluang pasar untuk komoditi unggulan Sangihe-Talaud dan sekaligus peluang meraih investor untuk masuk ke wilayah ini. Untuk itu perlu peninjauan dari pemerintah daerah mengenai peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pertumbuhan wilayah seperti peraturan perdagangan melalui BCA. Apabila peraturan tersebut ditinjau maka Kabupaten Sangihe-Talaud akan menerima imbas yang lebih besar dari keuntungan perdagangan antara ke dua negara. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan pedagang dari Filipina datang ke Manado untuk berbelanja dengan memanfaatkan jasa perhubungan laut dan udara Manado-Davao. Dengan adanya kemudahan berdagang melalui Sangihe-Talaud pedagang-pedagang dari Filipina akan juga datang ke wilayah ini mengingat secara geografis lebih dekat dibandingkan ke Manado.

Melihat potensi yang ada maka strategi pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe-Talaud perlu disesuaikan dengan potensinya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan harus tidak

merugikan generasi yang akan datang. Walaupun Kabupaten Sangihe-Talaud masih menyimpan kekayaan alam, terutama sumber daya laut tetapi pemanfaatannya harus seimbang untuk menjaga kelestariannya dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan. Oleh karena manusia memegang peranan penting dalam pembangunan baik sebagai penikmat pembangunan, maupun sebagai pelaku pembangunan maka dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada secara lestari diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sangihe-Talaud relatif masih rendah yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan kemampuan teknologi yang dimiliki. Dengan demikian peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang perlu dilakukan di Kabupaten Sangihe-Talaud.

Dari segi fasilitas pendidikan, pada tingkat sekolah dasar sudah merata sampai ke desa-desa bahkan di pulau-pulau terpencil yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Filipina, seperti Marore, Kawio dan Kawafuso. Namun tidak demikian halnya dengan fasilitas pendidikan tingkat lanjutan (SLTP) belum merata sampai ke desa-desa. Hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan sumber daya manusia di daerah ini adalah bahwa peningkatan pendidikan tidak harus melalui pendidikan formal. Apabila yang ditekankan hanya pendidikan formal maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru. Mereka yang telah mempunyai pendidikan cukup akan ke luar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Ini dikarenakan penduduk yang telah berpendidikan cenderung untuk tidak mau bekerja di sektor pertanian. Padahal kesempatan dan potensi yang ada di daerah ini adalah sektor pertanian, terutama perikanan dan perkebunan. Oleh karena itu, pendidikan formal yang sesuai adalah pendidikan kejuruan, pertanian, perikanan dan mungkin pariwisata. Sedangkan peningkatan pendidikan melalui jalur non-formal yang diperlukan adalah berbagai pelatihan dan ketrampilan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, misalnya peningkatan pengetahuan teknologi penangkapan ikan melalui magang pada perusahaan penangkapan ikan besar. Usaha ini sudah pernah dilakukan dengan melatih pemuda untuk belajar pelayaran dan tehnik penangkapan ikan di pelabuhan Bitung Sulawesi Utara. Di samping itu, telah dilakukan pula kerjasama dengan perusahaan penangkapan ikan Filipina berskala besar dengan memanfaatkan tenaga dari Sangihe-Talaud. Dengan cara

ini diharapkan terjadi alih teknologi mengingat para pelaut Filipina sudah terkenal mempunyai tehnik penangkapan yang lebih canggih.

Kabupaten Sangihe Talaud merupakan kepulauan yang letaknya sangat menyebar di lautan yang sangat luas dengan ombaknya yang terkenal ganas pada musim-musim tertentu, sehingga daerah ini juga merupakan daerah yang terisolir. Keadaan ini menjadi kendala untuk menempatkan tenaga-tenaga pengajar maupun penyediaan bahan-bahan untuk melaksanakan pendidikan formal dan non-formal. Sering terjadi tenaga-tenaga yang ditempatkan di pulau-pulau kecil (guru dan PPL pertanian) minta untuk dipindahkan ke pulau besar karena tidak tahan hidup di pulau kecil dengan sarana transportasi yang terbatas. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan sarana transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah ini.

DAFTAR BACAAN

Aswatini (ed)

- 1995 Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud dari Pulau di Wilayah Filipina. Seri Penelitian PPT-LIPI. No. 2/1995.
Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI

Aswatini dkk.

- 1995 Migran Sangir di Halmahera: Permukiman dan Kehidupannya
Jakarta: PPT-LIPI.

Aswatini dkk.

- 1996 Pemanfaatan Potensi dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara. Jakarta: PPT-LIPI.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe Talaud

- 1994 Pendapatan Regional Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe Talaud tahun 1989-1993, Kerjasama Bappeda TK II Kepulauan Sangihe Talaud dan Kantor Statistik Kabupaten Sangihe Talaud.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe Talaud

- 1994 Data Pokok Pembangunan Daerah Tahun 1993

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe Talaud

- 1995 Data Pokok Pembangunan Daerah Tahun 1994

Biro Pusat Statistik

- 1992 Penduduk Sulawesi Utara: Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Seri, S2. 22. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Biro Pusat Statistik

- 1997 Penduduk Sulawesi Utara: Hasil Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1995. Seri, S2. 22. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1994 Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tenggalandas. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1977 Monografi Sulawesi Utara (laporan penelitian)
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

-
- 1997 Sejarah Daerah Sulawesi Utara: Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah

Kantor Statistik Kabupaten Sangihe-Talaud

- 1996 Kabupaten Sangihe-Talaud Dalam Angka, 1995. Tahun:
Kantor Statistik Kabupaten Sangihe-Talaud.

United Nations. Departements for Economic anf Social Information and

- 1995 Population and Development. Programme of Actions Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994. Volume I. United Nations Publication Sales No. E. 95. XIII. 7.

Whitten, Anthony J; Muslimin Mustafa; Gregory S. Hendersen.

- 1987 The Ecology of Sulawesi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

